

**PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN MELALUI
PROGRAM DEMPLOT PERKARANGAN
TERPADU**

**(Studi Pada Lingkungan RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh :

INTAN PERMATASARI

145030107111059



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

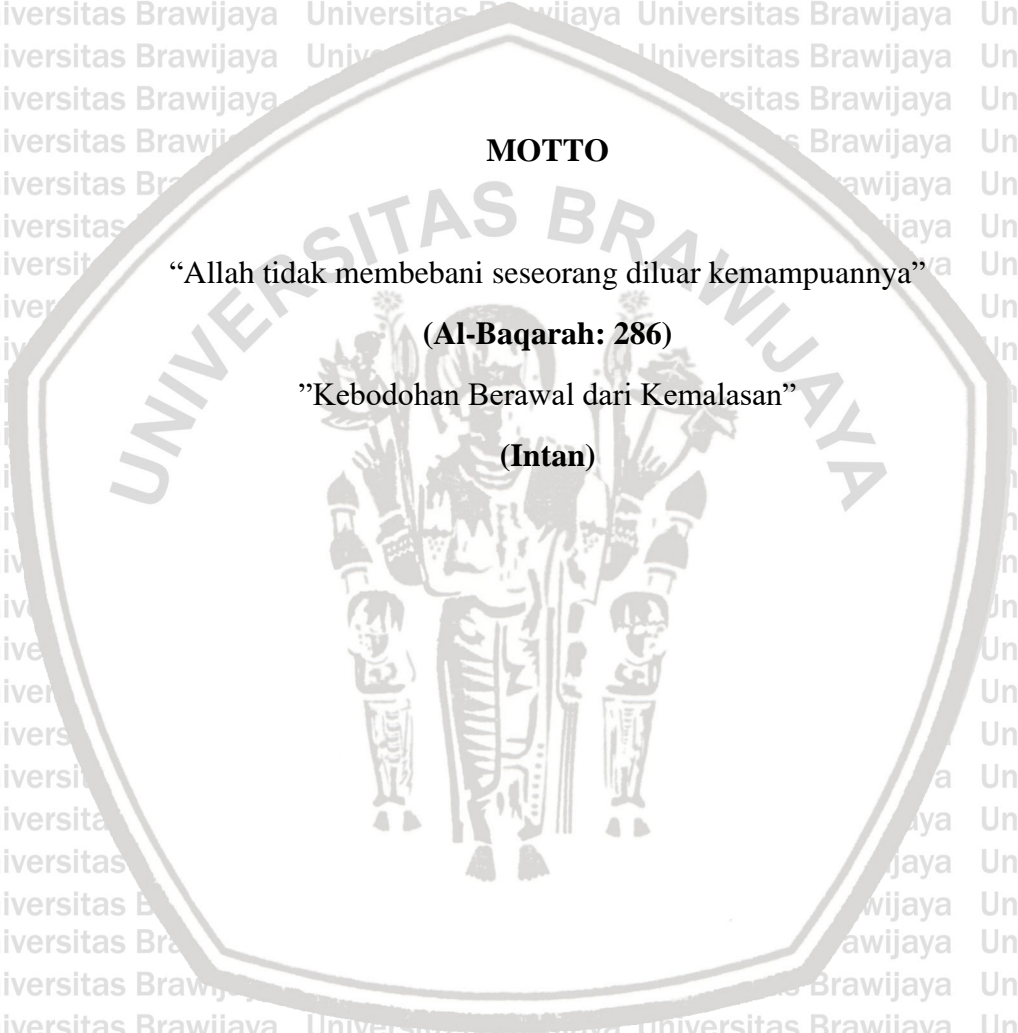
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”

(Al-Baqarah: 286)

”Kebodohan Berawal dari Kemalasan”

(Intan)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot
Perkarangan Terpadu (Studi Pada Lingkungan RW 09
Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota
Malang)

Disusun oleh : Intan Permatasari

NIM : 145030107111059


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 08 Mei 2019

Komisi Pembimbing,


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 08 Mei 2019

Mahasiswa



Nama : Intan Permatasari

NIM : 145030107111059

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Juni 2019
 Waktu : 11.00 - 12.00 WIB
 Skripsi Atas Nama : Intan Permatasari
 Judul : Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Perkarangan Terpadu (Studi pada Lingkungan RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

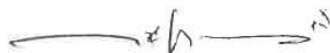


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
 NIP.19690524 200212 2 002



Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si
 NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota



M. Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP
 NIP. 19740614 200501 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada suami saya Joko Saputro yang telah menemani dan sabar dalam memberi nasihat dan membimbing saya dalam mengerjakan skripsi. Mertua saya yang selalu memberi semangat terus dalam melakukan segala yang saya lakukan. Sang Inspirator dalam hidup saya, Ayah Sukaryono. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Fatmawati. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimah kasih teruntuk kakak-kakak saya, M. Yuzni Azhari dan Ian Nofianto, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusan dalam proses penelitian ini. Serta terimah kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung saya.

RINGKASAN

Intan Permatasari, 2019. **Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Perkarangan Terpadu (Studi Pada Lingkungan RW 09 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. 123 halaman + xv

Pemberdayaan mengarahkan manusia agar sadar dengan kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan kekuatan yang telah ada menjadi berdaya dan dapat dimanfaatkan untuk aktifitas yang berarti. Pemberdayaan berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia itu sendiri, dimana kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh yang bersangkutan secara mandiri. Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang, sedangkan situsnya berada di RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Perkarangan Terpadu di Kota Malang dirumuskan melalui beberapa tahap yaitu: (1) Tahap pemberian lahan kosong; (2) Tahap sosialisasi dan bimbingan. Aktor-aktor yang terlibat selama proses pemberdayaan tersebut adalah pemerintah dan masyarakat RW 09. Selain itu selama proses tersebut, terdapat pula keberhasilan dalam pemberdayaan lingkungan yang dilihat melalui: 1) Peningkatan omset masyarakat RW 09; 2) Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah; 3) Kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam usaha; 4) Meningkatnya solidaritas diantara kelompok RT.

Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Perkarangan Terpadu di Kota Malang sudah berjalan dengan adanya bantuan dari keterlibatan aktor-aktor di dalamnya merupakan dukungan dalam kegiatan pemberdayaan lingkungan namun belum adanya aktor swasta sehingga permodalan yang di hasilkan belum maksimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Program, Demplot Perkarangan Terpadu

SUMMARY

Intan Permatasari, 2019. **Environmental Empowerment Through Integrated Farming Demonstration Plot Program (Study in Lingkungan RW 09 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun of Malang City)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. 123 pages + xv

Empowerment directs people to be aware of their abilities and utilize existing strengths to be empowered and can be used for meaningful activities. Empowerment is related to everything related to human activities itself, where the necessities of life must be fulfilled by those concerned independently. On the other hand, environmental conditions have reached alarming levels with a downward trend. The main cause is, because at the level of decision making, the importance of conservation is often ignored.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Malang City, while its website is in Lingkungan RW 09 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun of Malang City. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The results showed that Environmental Empowerment Through the Integrated Farming Demonstration Demonstration Program in Malang City was formulated through several stages, namely: (1) The stage of providing vacant land; (2) Stage of socialization and guidance. The actors involved during the empowerment process were the government and the community of RW 09. In addition, during the process, there were also successes in environmental empowerment which were seen through: 1) Increased community turnover RW 09; 2) Increase awareness and desire to change; 3) Ability to overcome obstacles in business; 4) Increased solidarity among RT groups.

Environmental Empowerment Through the Integrated Farming Demonstration Demonstration Program in the City of Malang is already underway with assistance from the involvement of actors in it as support in environmental empowerment activities but there is no private actor so that the capital generated is not maximal.

Keyword: Empowerment, Program, Demplot Pekarangan Terpadu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Perkarangan Terpadu (Studi Pada Lingkungan RW 09 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua dan mertua penulis, Bapak Sukaryono dan Bapak Kasiono dan Ibu Fatmawati dan Ibu Suparti yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Suami penulis, Joko Saputro yang setia dan tidak ada henti-hentinya dalam memberikan semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Demplot Pekarangan Terpadu Malang yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
9. Saudara-saudaraku tercinta yaitu M. Yuzni Azhari dan Ian Nofianto serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
10. Sahabatku yaitu Sayangku (Willa, Revani, Rani, Mutia, Mustika, Wulan, Putri, Farah), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman SMA (Angelina, Reyna, Tyas, Desy) yang sampai saat ini tetap menjalin silaturahmi dan memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

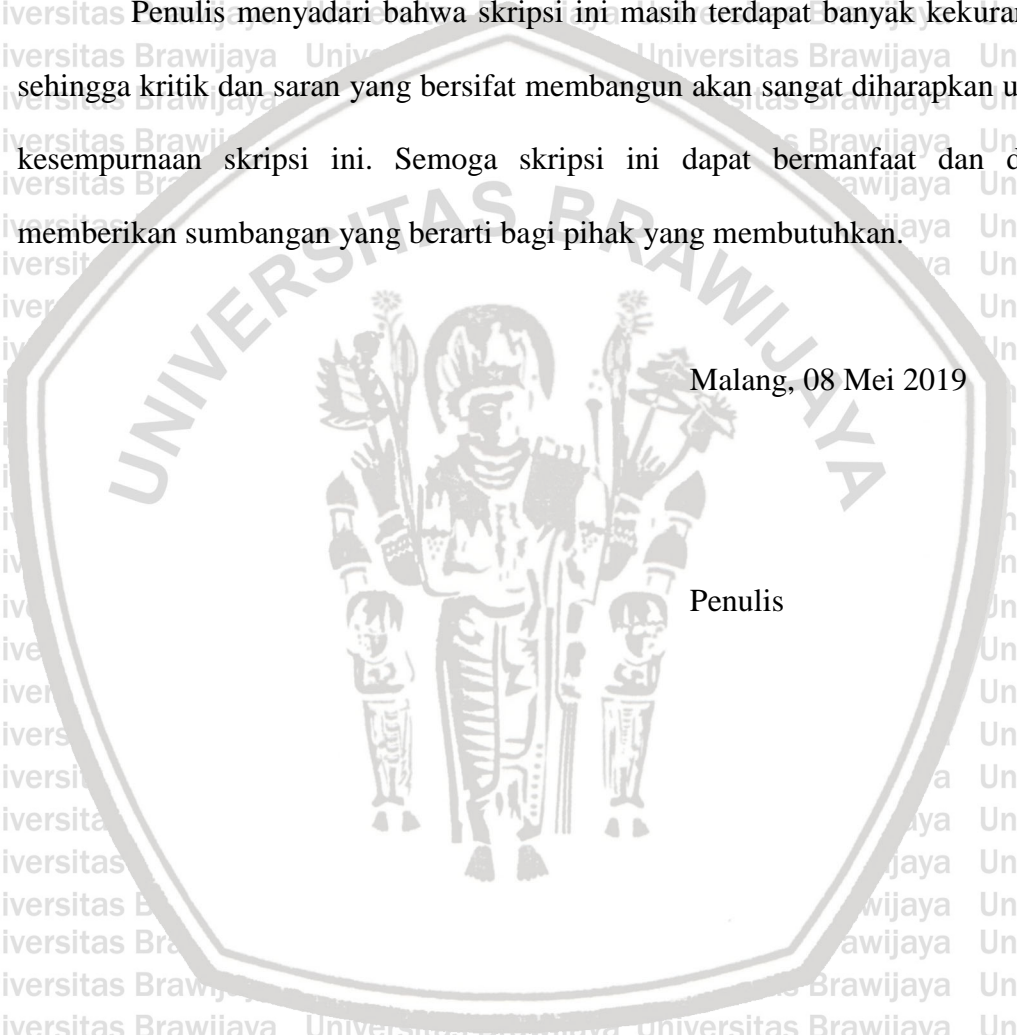
12. Keluarga Besar SEC FIA UB yang sudah pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis

13. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 08 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan.....	14
1. Definisi Pembangunan.....	14
2. Definisi Administrasi Pembangunan.....	18
B. Pembangunan Berkelanjutan.....	24
1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan.....	24
2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	26
3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	30
4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan.....	33
5. Indikator Pembangunan Berkelanjutan.....	35
C. Pemberdayaan.....	37
1. Definisi Pemberdayaan.....	37
2. Tujuan Pemberdayaan.....	40
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan.....	43
4. Strategi Pemberdayaan.....	44
5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan.....	48
D. Lingkungan.....	51
1. Definisi Lingkungan.....	51
2. Etika Lingkungan.....	54
3. Pengelolaan Lingkungan.....	60
E. Pemberdayaan Lingkungan.....	63
1. Definisi Pemberdayaan Lingkungan.....	63
2. Tujuan Pemberdayaan Lingkungan.....	66



F. Program Demplot Pekarangan Terpadu.....	68
1. Pengertian Demplot.....	68
2. Pengertian Pekarangan.....	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	74
B. Fokus Penelitian.....	75
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	76
D. Jenis dan Sumber Data.....	76
E. Teknik Pengumpulan Data.....	77
F. Instrumen Penelitian.....	79
G. Analisis Data.....	80

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	83
1. Profil Kota Malang.....	83
1.1 Kondisi Geografis Kota Malang.....	84
1.2 Visi dan Misi Kota Malang.....	86
1.3 Peta Lokasi Kota Malang.....	93
2. Gambaran Umum Kecamatan Sukun.....	93
2.1 Sejarah Kecamatan Sukun.....	93
3. Kelurahan Bandungrejosari.....	95
3.1 Kondisi Geografis.....	95
3.2 Visi dan Misi.....	96
3.3 Peta Kelurahan Bandungrejosari.....	97
4. Gambaran Umum Demplot Pekarangan Terpadu.....	97
B. Penyajian Data.....	101
1. Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu.....	101
a. Tahap-tahap Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu.....	101
b. Aktor-aktor yang terlibat Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu.....	103
2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun.....	107
C. Pembahasan.....	111
1. Tahap-tahap Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu.....	111
a. Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu.....	111
b. Aktor-aktor yang terlibat Melalui Program Demplot	



Pekarangan Terpadu.....	114
2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Lingkungan melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Miles & Huberman	81
2.	Peta Kota Malang	93
3.	Peta Kelurahan Bandungrejosari	97
4.	Struktur Organisasi	100



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Dokumentasi Penelitian	127
2.	Surat Survey/Riset	130
3.	Pedoman Wawancara	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini pembangunan secara terus menerus dilakukan di berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek-aspek lainnya.

Ditengah deraan tantangan global seperti tingkat kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan tantangan berat bagi para pengambil kebijakan di setiap negara.

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 mendefinisikan pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan sumber daya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi, di mana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pengembangan sektor lainnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan

sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan saat ini merupakan kegiatan yang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Menurut Riyadi dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:3) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka (Mitchell et al, 2000). Pembangunan haruslah selaras dengan pengelolaan sumber daya sehingga kesejahteraan jangka panjang seharusnya diberi prioritas yang sama dengan kebutuhan yang mendesak pada saat ini (Reinjntjes et al, 2011). Dampak dari pembangunan yang tidak berwawasan pada lingkungan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Kegiatan pembangunan seharusnya berkelanjutan dan mengacu pada kondisi alam dan pemanfaatannya agar berwawasan lingkungan (Sunu, 2001). Konsep pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini menjadi suatu konsep pembangunan yang diterima oleh semua negara di dunia untuk mengelola sumberdaya alam agar tidak mengalami kehancuran dan kepunahan. Konsep ini berlaku untuk seluruh sektor pembangunan termasuk pembangunan sektor peternakan (Mersyah, 2005).

Pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan pembangunan telah menimbulkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan suatu disiplin ilmiah baru yang

menjadikan objeknya pembangunan suatu negara dan bangsa ditinjau dari segi administrasi. Keputusan membangun yang telah diambil, rencana pembangunan yang telah dirumuskan, biaya yang tersedia, program kerja yang terperinci hanya akan terlihat manfaatnya apabila kesemuanya itu telah dilaksanakan dengan baik kiranya perlu diperhatikan bahwa pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang multi-dimensionil. Berbagai dimensi kehidupan masyarakat perlu turut dibangun dengan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pembangunan dari bangsa yang bersangkutan.

Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam menunjang pelaksanaan proses perencanaan pembangunan menjadi lebih baik, karena pada dasarnya partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Pembangunan haruslah selaras dengan pengelolaan sumber daya sehingga kesejahteraan jangka panjang seharusnya diberi prioritas yang sama dengan kebutuhan yang mendesak pada saat ini (Reinjntjes et al, 2011). Dampak dari

pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, pada umumnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan.

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan (Lastriyah, 2011). Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, muntaber dan lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman (Buhungo, 2012).

Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, dimana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial (Buhungo, 2012).

Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan bencana banjir saat musim penghujan tiba, ataupun masalah limbah yang dibuang secara sembarangan sehingga membuat air bersih menjadi tercemar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa

masyarakat belum benar-benar menyadari tentang arti pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan (Dayatri, 2012). Lingkungan yang bersih sangat penting diwujudkan agar terhindar dari berbagai jenis penyakit, seperti diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang disebabkan air dan udarasering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Selain hal tersebut, lingkungan yang bersih dapat mencegah terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor (Lastriyah, 2011).

Manusia berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dalam lingkungannya. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggungjawab akan kebersihan lingkungan, karena hal itu harus ditanamkan sejak dini, mulai dari sekolah dasarpun sudah diajarkan untuk selalu hidup bersih dan sehat (Juju, 2013).

Manusia dan lingkungannya merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, pengenalan terhadap lingkungan beserta segala masalahnya merupakan suatu cara untuk dapat lebih menentukan fungsi dan peranan manusia dalam lingkungan hidupnya (Lastriyah, 2011). Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan perbaikan lingkungan adalah bahwa lingkungan tempat manusia hidup, khususnya tempat manusia bekerja, bergerak, dan belajar harus memenuhi syarat kesehatan. Artinya lingkungan tersebut tidak mudah menimbulkan hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya (Juju, 2013). Pengaruh buruk dari lingkungan sebenarnya dapat dicegah dengan mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat dan bersih serta menciptakan lingkungan yang baik. Kebiasaan hidup sehat dilakukan dalam

berbagai cara seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi dan bak mandi secara rutin.

Lingkungan alam yang ada disekitar merupakan sumber bagi kehidupan manusia, sedangkan pengetahuan tentang teknologi mempunyai peran penting untuk mengolah SDA. Dengan demikian, antara teknologi dengan lingkungan akan terjadi interaksi atau saling berpengaruh, baik itu sifatnya positif, maupun negatif. Kemajuan teknologi dan lingkungan di mana masyarakat itu berada akan membawa pengaruh terhadap perkembangan pola kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini biasanya tercermin dalam pola-pola kehidupan yang membawa alternatif baru pemecahan masalah kehidupan. Dengan adanya industri masyarakat yang dahulunya tidak mengenal industri sebagai lapangan pekerjaan, sekarang tumbuh menjadi daerah industri dengan segala akibat yang dapat menimbulkan perubahan kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan plural.

Hildred Geertz menyebutkan bahwa ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia yang masing-masing terdiri dari bahasa dan identitas kultural yang berbeda (Nasikun, 2013:41-42). Budaya yang begitu beragam memberi kearifan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk memaknai dan mengembangkan budaya daerah sebagai kekayaan bangsa. Salah satunya budaya Jawa yang merupakan salah satu bagian dari beragam kebudayaan dari suku-suku yang ada di Indonesia.

Kebudayaan Jawa merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Jawa, tidak

heran jika budaya Jawa selalu menjunjung tinggi arti sebuah kebenaran dan kebersamaan (Herawati, 2012: 64).

Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut merupakan sesuatu yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, khususnya orang Jawa. Orang Jawa dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai tradisi pemikiran metafisik dan lekat dengan mistikisme atau mistisisme. Tradisi pemikiran ini diaplikasikan dalam segala aspek budaya, baik yang bersifat material maupun non-material.

Kebudayaan tersebut terwujud lewat upacara ritual mulai dari tradisisebelum kelahiran sampai upacara pasca kematian, mulai dari bentuk arsitektur sampai cara berfikir masyarakatnya (Jaya, 2012: 133).

Saksono dan Dwiyanto (2012) mengatakan bahwa dalam hal mencari keselamatan cara hidup bertani pada masyarakat Jawa sejak dahulu sampai sekarang pada umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional baik dalam hal teknis mengolah pertanian maupun berkaitan dengan sistem kepercayaan mereka yaitu penyelenggaraan upacara-upacara yang berkaitan dengan pertanian. Sampai sekarang proses tahap-tahap penanaman padi di Jawa belum kehilangan sifat religiusnya dan masih dirayakan supaya para petani selalu mendapat keselamatan, oleh sebab itu mereka sangat peduli dengan berbagai bentuk keselamatan.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin ketatnya persaingan kesempatan kerja di era modernisasi ini maka menuntut adanya spesialisasi pekerjaan. Akibatnya dasar-dasar kemasyarakatan yang lama ada di dalam masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga adat-istiadat (tradisi) pun semakin banyak yang ditinggalkan. Sehingga kearifan lokal

masyarakat tradisional Jawa sebagian masih ada yang diberlakukan, namun sebagian lagi sudah tidak berlaku. Modernisasi dan semakin beratnya beban hidup perlahan mulai mengikis dan melanda sisa-sisa sistem kemasyarakatan (Herusantoto, 2008: 68).

Disadari atau pun tidak, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, meskipun terkadang perubahan didalamnya tidak selamanya mencolok atau sangat berpengaruh terhadap kehidupan luas. Ada perubahan yang bersifat cepat dan mencakup aspek-aspek yang luas, ada perubahan yang bersifat lambat dan berjalan sangat lambat pula. Perubahan terjadi dalam masyarakat akan terlihat jika ada suatu penelitian mengenai keadaan yang terjadi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang kemudian dibandingkan dengan kehidupan yang terjadi dalam masa lampau.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala yang sangat normal, yang kemudian pengaruh dari adanya perubahan akan diterima dengan cepat ke bagian-bagian lain di dunia. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi modern. Selain itu, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya revolusi, modernisasi dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat pemberi perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan atau pembaharuan merupakan dasar dari modernisasi.

Pembaharuan ini mencakup bidang-bidang yang sangat banyak tergantung pada bidang mana yang diutamakan oleh penguasa (Rosana, 2011: 32).

Arus modernisasi merupakan sesuatu yang sulit dikendalikan, karena informasi begitu mudah dan secara cepat bisa diterima oleh masyarakat dari seluruh belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh positif maupun negatif bagi masyarakat dunia, termasuk didalamnya Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat kabur bahkan mulai tidak relevan. Dinding pembatas antarbangsa menjadi semakin terbuka bahkan mulai hanyut oleh arus perubahan. Oleh karena itu, Indonesia menghadapi kewajiban ganda yaitu di satu pihak melestarikan warisan budaya bangsa dan di pihak lain membangun kebudayaan nasional yang modern (Setiadi, Eny M. et.al, 2007: 60).

Lingkungan RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari termasuk salah satu desa di Kota Malang yang memperoleh program-program pemberdayaan dari pemerintah dalam rangka kebutuhan tanam masyarakat. Program ini masuk dengan konsentrasi pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif peserta program yang dilakukan oleh Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang serentak dijalankan oleh seluruh warga RW 09 untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan kosong. Lahan kosong yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas lahan kosong dengan ditanami beberapa bibit-bibit yang bermanfaat dan memiliki nilai tersendiri.

Terdapat beberapa manfaat dari adanya lahan kosong selain untuk membangun perumahan atau rumah yaitu memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat untuk menanam sayur dan sebagainya, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar sebagai tempat pembelian bahan masak yang bersih, sehat, dan higienis tanpa ada campuran obat-obat dalam tanaman tersebut. Maka dari itulah adanya penanaman pada lahan kosong sangat memfasilitasi masyarakat dalam memberikan kesehatan pada keluarganya. Agar suatu tempat terjaga dan tidak mengalami kerusakan atau bahkan pengalihan fungsi lain pada lahan, maka perlu diadakan pengelolaan lahan. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk melestarikan dan mencegah dari adanya kerusakan pada penghijauan.

Lahan Demplot Pekarangan Terpadu yang dilakukan oleh kelompok tani RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan luas lahan $\pm 1,5$ hektar. Beberapa lahan demplot ditanam seperti sayuran, kangkung, tomat, dan lain-lain, sedangkan pada lahan demplot lainnya ditanam yang memiliki beberapa keunggulan dan mempunyai produksi tinggi dengan kualitas yang baik, seperti kubis, terong, lemon, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti menilai betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam mengelola lingkungan di Janti Kelurahan Bandungrejosari. Maka peneliti akan menyusun skripsi dan mengambil judul :”**Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu (Studi Kasus Pada Lingkungan RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan lingkungan melalui program demplot perkarangan terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun?
2. Bagaimana indikator keberhasilan pemberdayaan lingkungan melalui program demplot perkarangan terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan lingkungan oleh masyarakat melalui program demplot perkarangan terpadu
2. Untuk mengetahui indikator keberhasilan pemberdayaan lingkungan yang dilakukan masyarakat melalui program demplot perkarangan terpadu

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan terkait dengan pengelolaan masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat lain untuk menjadikan lahan kosong yang berguna.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan lingkungan oleh masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan;
- b. Menjadikan bahan evaluasi terkait apa yang telah dilakukan; dan
- c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam proses pembangunan program demplot pekarangan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui secara singkat garis besar yang akan dideskripsikan peneliti, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisi tentang tinjauan pustaka konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan secara teori yang dikutip dari berbagai buku ilmiah, jurnal, maupun perwakilan penelitian sebelumnya.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan

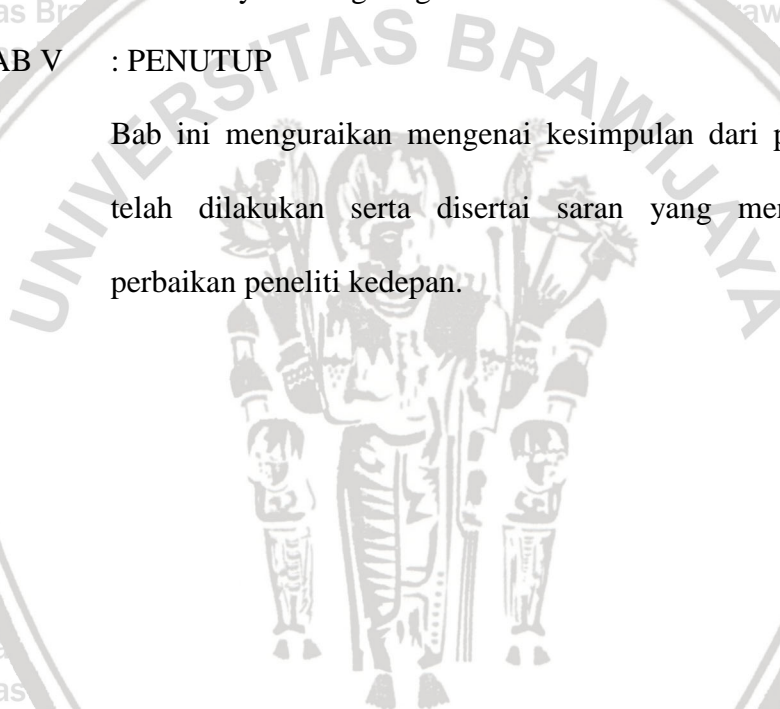
sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian inti daripada penelitian yang menguraikan tentang fokus yang diteliti terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan dengan studi kasus pada Pemberdayaan Lingkungan

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta disertai saran yang mendukung guna perbaikan peneliti kedepan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Di Indonesia istilah pembangunan seringkali berkonotasi atau berarti dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju kekeadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu. Dalam pengertian pembangunan, para ahli kemudian memberikan definisi yang juga bermacam-macam sama halnya dengan perencanaan. Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan atau diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara

langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut.

Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Definisi dari pembangunan adalah perkataan yang digunakan secara luas dalam seluruh media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang biasa diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari timur dan juga barat. Walaupun sangat sering diucapkan dan didengar namun pengertian pembangunan begitu luas cakupannya.

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Apabila definisi tersebut dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan yaitu :

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan, meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a process*). Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Memang salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah bahwa masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil, artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budayaa, pertahanan dan keamanan nasional, dan administrasi. Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation-building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan pengertian-pengertian tersebut sebagai titik tola, penulis kini akan memberikan definisi kerja (*working definition*) daripada administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian yang telah ditentukan”

Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah usatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat.

Dalam pada itu memang harus diakui bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan adalah sangat penting dilakukan meskipun peranan pemerintah itu demikian pentingnya, namun seluruh unsur masyarakat harus turut serta jika proses pembangunan itu hendak berjalan lancar.

2. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah merupakan orientasi baru dalam Ilmu Administrasi. Dikatakan suatu orientasi baru karena sampai sekarang administrasi pembangunan belum secara universal diakui sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Ilmu administrasi pembangunan dewasa ini masih berada dalam tahap embrional.

Meskipun administrasi pembangunan sebagai disiplin ilmiah masih berada pada tahap embrional, sesungguhnya ide serta usaha untuk mengembangkan prinsip-prinsip administrasi pembangunan telah mulai timbul segera setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II, akan tetapi usaha yang lebih serius dilaksanakan oleh para ahli baru setelah permulaan dasa warsa enam puluhan.

Administrasi pembangunan belumlah diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Dewasa ini perkembangan menuju ke arah itu terlihat dalam berbagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan yang diperkembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara. Oleh karena itu perlu kiranya diberikan uraian penjelasan tentang administrasi negara. Akhir abad ke 19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan ilmu administrasi negara. Dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi administrasi pemerintahan di Amerika Serikat. Pelopor-pelopor dari pada ilmu tersebut adalah antara lain Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White. Bahkan tulisan Alexis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula pelopor penulisan tentang pemerintahan di Amerika Serikat.

Administrasi pembangunan lahir dan berkembang setelah para sarjana administrasi menaruh perhatian yang cukup besar terhadap masalah-masalah pembangunan yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang. Meskipun demikian perkembangan administrasi pembangunan menunjukkan bahwa sudah semakin banyak para ahli di samping para ahli administrasi yang menaruh perhatian terhadap administrasi pembangunan itu, terutama para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam ilmu-ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi dan sebagainya. Karena itu ada optimism yang besar di kalangan para pelopor administrasi pembangunan bahwa ilmu administrasi pembangunan akan cepat mencapai kedewasaan.

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, pengembangan prinsip-prinsip administrasi pembangunan kiranya memerlukan usaha yang intensif agar supaya

prinsip-prinsip administrasi pembangunan itu sungguh diakui sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Dengan memperkembang pengertian, fungsi dan wilayah-wilayah dari pada ilmu tersebut masih jelas terkaitnya abstraksi, gambaran atau contoh-contoh empiris dari negara Amerika Serikat bahkan di kemudian hari perkembangan ilmu administrasi negara juga lebih relevan bagi negara-negara yang sudah maju.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan merangkul dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.

Perkembangan administrasi pembangunan, baik dalam tataran teoriitis maupun dalam praktik, mengikuti perkembangan studi administrasi khususnya administrasi negara dan studi pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami administrasi pembangunan perlu dimulai dengan pemahaman mengenai administrasi dan pembangunan.

Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari studi administrasi perbandingan (*comparative administration*), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi, dan untuk menyempurnakan sistem administrasi di negara-negara tersebut. Pembangunan sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan merupakan salah satu tujuan administrasi pembangunan. Pada dasarnya, administrasi

pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.

Menurut SP. Siagian (2009) mendefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dari definisi pembangunan menurut Siagian tersebut, jelas dapat kita lihat pokok-pokok ide yang tersurat yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencangkup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

Definisi kerja (*working definition*) administrasi pembangunan menurut Siagian (2009) adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini sudah tumbuh ke arah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisa dan penyusunan berbagai model, biarpun masih jauh dari memadai. Perkembangan studi komparatif ilmu administrasi negara ini dapat pula di lihat dari segi alasan yang mendasarinya. Pertama adalah kebutuhan pengembangan model dan konsep atau teori

administrasi, dan alasan lainnya adalah keperluan pengembangan administrasi pembangunan.

Dalam administrasi pembangunan, administrator juga diharapkan sebagai unsur pembaharu dan kecuali itu juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktek administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan pula bahwa administrasi pembangunan lebih berorientasi kepada peranan serta fungsi pemerintah negara-negara baru berkembang dalam pembangunan nasional secara berencana. Dua ciri utama yang membedakan dan dianggap paling penting dikemukakan di sini.

Ciri pokok pertama, adalah orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling kait-berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan. Pengarang-pengarang lain menyebutnya bahwa dalam administrasi pembangunan terdapat tingkat kepeloporan (*degree of pioneering*), dan beberapa pengarang lain menyebutkan administrasi yang merintis perubahan (*initiate changes*). Administrasi pembangunan misalnya tidak saja menghendaki suatu administrasi kepegawaian yang rapi tetapi mungkin menuntut suatu perubahan sistem administrasi kepegawaian yang lebih memungkinkan diperolehnya pegawai-pegawai yang diperlukan pada sektor-sektor prioritas serta yang lebih berorientasikan kepada prestasi.

Ciri pokok kedua, pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Di lain pihak administrasi pembangunan berarti kemampuan sistim administrasi untuk menampung adanya akibat-akibat pembangunan.

Pendekatan administrasi pembangunan merupakan cara pendekatan yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang menyeluruh. Administrasi memberikan jasa (pelayan) untuk pembangunan tersebut dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri. Pada pokoknya pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa (dalam perumusan yang terdahulu disebutkan: administrasi (pengendalian usaha) untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik di kemudian hari).

Apabila sudah diuraikan tentang ciri-ciri utama dan berbagai perumusan mengenai administrasi pembangunan, maka digambarkan mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan, yaitu :

Pertama, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata

kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut sebagai *the development of administration*. Fungsi lainnya adalah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut juga sebagai *the administration of development*. Kedua, administrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi. Pertama adalah perumusan kebijaksanaan pembangunan, kedua adalah pelaksanaannya secara efektif.

Oleh karena itu salah satu fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun partisipasi masyarakat. Administrasi negara untuk menunjukkan kepada keadaan suatu administrasi negara tertentu atau penyempurnaan administrasi negara. Seringkali administrasi negara ini juga disebut sebagai aparatur pemerintah ataupun birokrasi pemerintah. Hal ini lebih lagi mempunyai dasar oleh karena pada kenyataannya negara-negara baru berkembang masih belum mempunyai administrasi untuk pembangunan yang efektif sehingga di dalam pendekatan administrasi pembangunan termasuk usaha penyempurnaan administrasi negara untuk lebih dapat mendukung usaha-usaha pembangunan.

B. Pembangunan Berkelanjutan

1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari dua kata, yakni pembangunan dan berkelanjutan. Pembangunan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *sustainable* atau lebih dikenal dengan *capable of being sustained* sedangkan pembangunan berasal dari

development. Jika digabungkan secara sederhannya arti kedua kata ini memiliki makna, kemampuan untuk tetap melakukan pembangunan yang sesuai dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli.

Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa decade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).

Meskipun mendapat kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya Fundamental ekonomi yang digunakan dalam model *The Limit to Growth*, namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini mencuat kembali ketika pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau dikenal sebagai Brundland Commission menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks

pembangunan yang berkelanjutan. agenda ini sekaligus menjadi tantangan konsep

pembangunan ekonomi neo-klasikal yang merupakan konsep pembangunan

Konvensional yang selama ini dikenal, yang menyatakan bahwa *sustainable*

development is one that meets the needs of the present without compromising the

ability of the future generations to meet their own need (pembangunan berkelanjutan

adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang).

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki

mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung

kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan

sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat agar

masyarakat maupun Negara kita dapat bersaing dan berkembang mengikuti

perkembangan jaman secara globalisasi.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya

pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan

budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi

kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat

yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan

kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya

alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang.

Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencitacitakannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu:

- a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, di sini yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin.
- b. Gagasan keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Hal ini berarti, upaya peningkatan kualitas manusia yang dilakukan pada masa ini harus mempertimbangkan juga kualitas manusia pada masa yang akan datang. Dalam memanfaatkan lingkungan sebagai penopang pembangunan harus pula memperhitungkan keterbatasannya, sehingga tidak boleh serakah agar tidak habis pada saat ini. Hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Proses pembangunan hendaknya berlangsung terus menerus dengan ditopang oleh kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan.
- b. Lingkungan hidup memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan dan penciutan.
- c. Semakin baik kualitas lingkungan maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap kualitas hidup yang tercermin antara lain pada meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian.

d. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternatif lainnya, sehingga dapat digunakan selama mungkin.

e. Pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang.

3. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi,2004) Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang . Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan

terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang.

Pezzey (1992) dalam Fauzi, 2004 melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multi dimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Perman (1997) dalam Fauzi 2004 mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternative pengertian:

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*),
2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*),
4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan

5. Keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Budimanta (2006) mengatakan untuk suatu proses pembangunan berkelanjutan maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Cara berpikir yang integratif dalam konteks ini pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
- b. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka pikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini telah menjadi *nett* importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), moda transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya.

c. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

d. Distribusi keadilan social ekonomi dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan social yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti: meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara

langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem.

Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan

pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

5. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses untuk membawa tiga proses pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pada tingkat lokal, pembangunan berkelanjutan menghendaki bahwa pengembangan ekonomi dapat menopang kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara lokal. Jika hasil pengembangan ekonomi (kesejahteraan) tersebut ingin didistribusikan dalam jangka panjang, maka perlindungan lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologi adalah salah satu jalan yang harus ditempuh (ICLEI, 1996). Konsepsi pembangunan berkelanjutan sebagai suatu terminologi mengalami popularitasnya melalui publikasi WCED (1987) yang berjudul *Our Common Future* pada saat Konferensi PPB untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED). Pembangunan

berkelanjutan selanjutnya didefinisikan sebagai “pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kehidupannya”.

Pada perkembangannya, pembangunan berkelanjutan juga ditujukan untuk mencari strategi inovatif untuk merubah struktur kelembagaan dan kebijakan serta perubahan perilaku dari tingkat individu hingga tingkat global (IISD, 2005). Kriteria ideal indikator pembangunan berkelanjutan adalah (Warren, 1997) :

- a. Merefleksikan suatu dasar atau fundamen ekonomi dalam jangka panjang dan sosial-lingkungan bagi generasi yang akan datang
- b. Mudah dipahami dan jelas: sederhana, dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat
- c. Dapat dikuantitatifkan
- d. Sensitif terhadap perubahan lokasi atau grup masyarakat
- e. Prediktif dan antisipatif
- f. Memiliki acuan atau nilai ambang relatif mudah untuk diikumpulkan dan digunakan
- g. Aspek kualitas: metodologi yang digunakan untuk membangun indikator harus jelas terdefiniskan dengan akurat, secara ilmiah dan sosial diterima
- h. Sensitif terhadap waktu: jika diaplikasikan setiap tahun indikator dapat menunjukkan trend yang representative

C. Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki daya. Daya artinya kemampuan atau kekuatan. Berdasarkan pengertiannya maka pemberdayaan adalah membuat sesuatu atau memiliki daya atau mempunyai kekuatan. Pengertian diatas diperkuat oleh Sulistiyani (2004:75) bahwa “paradigm baru memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan”. Dalam konteks pembangunan, istilah pemberdayaan bukanlah istilah baru, melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memiliki peran penting dalam pembangunan.

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia, usaha, masyarakat dalam bentuk penumbuh iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan kegiatan serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai proses merupakan perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian (Nadhir, 2009:1). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada hasil atau keadaan yang

ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki rasa kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Menurut Jim Ite, 1995 dalam Zubaedi (2013:74)

“Pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*).

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to* yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *To give power of authority to* yang berarti member kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang

dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidaknya.

Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai membentuk klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.

Sementara Shardlow (1998: 32) mengatakan pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan memang berkaitan erat dengan pilihan, kontrol, dan kekuasaan seseorang. Terkait dengan pemberdayaan perempuan, maka pemberdayaan merupakan kemampuan untuk membuat suatu keputusan dan memengaruhi hasil yang berguna bagi diri mereka sendiri dan keluarga (Malholtra, 2002). Pemberdayaan merupakan perubahan, pilihan, dan kekuasaan. Ini merupakan sebuah proses

perubahan di mana individu atau kelompok dengan sedikit atau tanpa kekuasaan memperoleh kekuasaan dan kemampuan untuk membuat pilihan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Struktur kekuasaan yang memilikinya, sumberdaya apa, dan bagaimana memanfaatkannya secara langsung memengaruhi pilihan perempuan untuk dapat memanfaatkannya dalam kehidupan mereka (Linda Mayoux, 2001: 18).

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan sehingga kemandirian perlu dukungan kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, psikomotorik dan efektif. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 5 menyebutkan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasa rakyat dari kemiskinan.

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikarto dan Soebiato (2013:111) meliputi berbagai upaya perbaikan, antara lain :

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan metode perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi dan inovasi sumber pembiayaan, penyedia;
- c. Perbaikan tindakan (*better actions*) dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber data yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik;
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaringan kemitraan usaha;
- e. Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;

- f. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat;
- g. Perbaikan lingkaran (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan;
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat; dan
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang dilakukan oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Bahwa adanya pemberdayaan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri agar mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemberdayaan khususnya pada sektor industri sebagai salah satu bentuk upaya agar sektor industri berkembang melalui pemberian fasilitas pada industri yang fasilitasnya kurang memadai.

3. Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai

status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

Pemberdayaan dilakukan sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas, oleh karena itu dalam pemberdayaan perlu melakukan beberapa langkah sesuai yang dengan tahap-tahap pemberdayaan agar dapat terlaksana dengan sukses. Upaya pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996 :

159-160) dilakukan melalui 3 arah yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, artinya setiap manusia atau masyarakat telah memiliki potensi

sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya potensi yang dimiliki;

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana dan prasarana lainnya;

3. Melindungi masyarakat, artinya dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

4. Strategi Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Ismawan yang dikutip oleh Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:170) menetapkan lima program strategi pemberdayaan, yaitu:

a. Pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan posisi tawar menawar) masyarakat. Terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, maka

peningkatan kemampuan masyarakat yang diupayakan melalui pemberdayaan adalah sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian (Mardikanto dan Soebianto, 2012:223).

b. Pengembangan kelembagaan kelompok. Kelembagaan kelompok digunakan sebagai alat penghantar tambahan sumber ke dalam masyarakat, sebagai alat penyebaran misi dan wawasan kegiatan pembangunan, dan sebagai alat pemberdayaan bagi masyarakat lokal.

c. Pemupukan modal masyarakat. Menurut Kartasmita dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:173) masalah yang paling mendasar dalam perubahan structural adalah akses ke dalam dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

d. Pengembangan usaha produktif. Pengembangan usaha produktif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/ rumah tangga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan kegiatan dan kesempatan yang berbasis sumberdaya lokal.

e. Penyediaan informasi tepat guna. Informasi yang jelas dan terarah juga sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu tidak kalah penting adalah akses ke dalam teknologi, dalam hal ini teknologi sederhana yang aplikasinya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan telah

disesuaikan ke dalam kondisi sosial, budaya, tingkat ekonomi serta nilai-nilai lain yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Prasojjo dalam Suryono dan Nugroho (2008) menyebutkan terdapat empat strategi dalam memberdayaan masyarakat, yakni:

- a. Memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subjek
- b. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, atau demokratis, efektif dan efisien
- c. Mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai profesionalisme
- d. Memaksimalkan peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mengatur agar penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berjalan lancar.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemberdayaan yakni membentuk individu/masyarakat yang mandiri. Dengan adanya program strategi menurut Mardikanto dan Soebianto (2012) dapat diterapkan dalam pengembangan desa wisata yang ada di Indonesia. Dimana pengembangan desa wisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Hutomo (2000:7-10) secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam berbagai kegiatan yaitu:

a. Bantuan modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah masalah pemodalannya. Tidak adanya modal mengakibatkan tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam konteks ini ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu *Pertama*, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan masyarakat, aspek ini nampaknya perlu dipikirkan bersama. *Kedua*, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek permodalan ini adalah 1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; 2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif; 3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

b. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

c. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

d. Kelembagaan

Keberdayaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain itu mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses yang diinginkan seperti pemodalan, media musyawarah, dan lainnya.

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Subianto,2004).

Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapi sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi ke kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Sumodiningrat, 1999).

Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2009:63-66) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak

goring, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangannya mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan perilaharaan untuk dternak, memperoleh kredit usaha.

5. Kebebasan relatif dan dominasi keluarga: mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

D. LINGKUNGAN

1. Definisi Lingkungan

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O^2) yang dihirup oleh nya. Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar yang masih belum menentu akan tinggal dimana dan membuat perubahan pada sekitar tempat yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, tak jarang masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai atau biasa disingkat dengan DAS.

Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organism. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan. Sedangkan menurut (Soemarwono, 2008:42) lingkungan hidup merupakan ruang yang di dalamnya ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup.

Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, di dalam mana organisme merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis dalam arti berubah-ubah setiap saat. Perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu, tempat dan keadaan tumbuhan itu sendiri. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh banyak faktor, faktor pertama yang menjadi penentu ialah jenis dan jumlah unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup tersebut. Faktor ketiga ialah kondisi lingkungan hidup itu sendiri, dan ke empat adalah faktor non materil seperti suhu dan kebisingan. Faktor-faktor tersebut yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara faktor dan lingkungannya haruslah seimbang. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, namun interaksi manusia tidaklah sederhana melainkan sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena di dalam lingkungan terdapat banyak unsur yang saling mempengaruhi.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Pemberdayaan lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan termasuk didalamnya masalah lingkungan, seperti lingkungan tempat tinggal mereka, apakah itu di kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan konservasi, dan lain sebagainya.

Perlu ditumbuhkan dalam pemberdayaan lingkungan adalah timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya.

Dari berbagai pengertian lingkungan yang sama itu perlu disadari bahwa pengelolaan oleh manusia sampai saat ini tidak sesuai dengan etika lingkungan. Etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta, sementara itu manusia beranggapan bahwa manusia bukan bagian dari alam semesta sehingga manusia secara bebas mengelolanya bahkan sampai merusak lingkungan hidup.

2. Etika Lingkungan

Seperti telah diutarakan sebelumnya menghadapi tantangan pembangunan masa datang tidak cukup hanya dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan dan teknologinya belaka, melainkan juga harus disertai dengan garis-garis kebijaksanaannya serta strateginya untuk menghadapi tantangan tersebut. Misalnya, sepanjang menyangkut garis kebijaksanaan pemerintah untuk menghadapi tantangan ketidak-seimbangan antara faktor kependudukan dengan sumber daya alam yang tersedia di Bumi Pertiwi ini disusun langkah-langkah sebagai berikut sebagai landasan kebijaksanaan:

- a. Kendalikan penduduk melalui program Keluarga Berencana yang berhasil dengan pendekatan-pendekatan yang manusiawi;
- b. Sebarkan penduduk secara merata melalui program transmigrasi baik berupa transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa;
- c. Efektifkan dan efisienkan pendayagunaan sumber-sumber alam melalui peningkatan kegiatan industrialisasi;
- d. Pulihkan kerusakan-kerusakan sumber daya alam dalam lingkungan hidup yang sudah kritis, agar kemampuannya bisa ditingkatkan untuk menaikkan daya tampung lingkungan;
- e. Lakukan upaya pelestarian sumber daya alam dan penyerasian lingkungan hidup dalam berbagai kegiatan pembangunan, agar pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dapat menjamin kelestarian bangsa.

Kemudian, atas dasar pola kebijaksanaan di atas disusun strategi-strategi untuk menjamin keberhasilan pola kebijaksanaan tersebut, yang kelak akan bisa dituangkan ke dalam program-program pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain:

- a. Penyelamatan hutan, tanah dan air;
- b. Penilaian dampak lingkungan secara seksama (baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya dalam perjalanan ruang dan waktu) terhadap usulan kegiatan pembangunan yang akan menimbulkan dampak penting (Pasal 16, UU No 4/1982);
- c. Pengaturan tata ruang hidup yang serasi sehingga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- d. Perlindungan terhadap warisan alam dan warisan budaya yang ternyata bisa memperkaya pertumbuhan kehidupan bangsa.

Meskipun demikian, semua bentuk pola kebijaksanaan dan strategi pembangunan itu yang disusun secara mentereng dan professional akan musnah, bila tidak dilandasi secara mendasar dan mendalam oleh suatu sistem etika hidup yang berlaku dan perlu dikembangkan dalam masyarakat. Sangat sulit untuk bisa memperjuangkan keberhasilan suatu pola kebijaksanaan dan strategi pembangunan dalam sistem moralitas yang kosong secara budaya. Etika-etika kehidupan yang dianut manusia beraneka ragam (Diesing, 1982), misalnya:

- a. Etika yang didasari oleh rasionalitas ekonomi, yakni pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal;

- b. Etika yang didasari oleh rasionalitas teknis, yakni instrumental terhadap kebutuhan penyusunan dan kebijaksanaan;
- c. Etika yang didasari oleh rasionalitas sosial, yakni pencapaian suatu tujuan melalui harmonisasi dalam kehidupan sosial;
- d. Etika yang didasari oleh rasionalitas politis, yakni pencapaian tujuan berdasarkan konsesus dari berbagai pelaku politik;
- e. Etika yang didasari oleh rasionalitas hukum, yakni pengakuan adanya perlindungan hukum dalam perikehidupan manusia.

Dari semua bentuk-bentuk etika hidup di atas yang didasari oleh pila rasionalitas dan penalaran tertentu sehingga pada dasarnya sudah berkembang dan dinikmati oleh masyarakat, muncul sebuah etika lagi yang berkembang sejak dua dasawarsa terakhir ini (1961-1970 dan 1971-1980) yakni yang dikenal dengan etika lingkungan. Etika lingkungan ini yang biasa juga dikenal dengan etika ekologis adalah suatu etika yang didasari oleh rasionalitas ekologi atau lingkungan, yang memberikan nilai penting pada sistem ekologi (yang disebut pula Ekosistem) atau lingkungan sebagai suatu sistem pendukung kehidupan makhluk apapun di planet Bumi termasuk manusia.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma dalam menentukan perilaku manusia. Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya, etika lingkungan sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan

dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

(Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa (www.kbbi.web.id).

Memang sudah sejak zaman dahulu kala nilai penting dari lingkungan hidup sudah di acapkali diabaikan orang. Plutarch misalnya, seorang tokoh falsafah di zaman kejayaan Yunani yang hidup di tahun 1000 Masehi pernah mengatakan bahwa:

“Manusia lebih peka terhadap sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat dari pada sesuatu yang bertentangan dengan alam (lingkungan hidup)”.

Di dalam etika lingkungan terdapat prinsip-prinsip yang digunakan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Keraf dalam (Setyono, 2011: 8-10) antara yaitu, prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, tidak merugikan, hidup sederhana dan serasi dengan alam, keadilan, demokrasi, integritas moral.

Dengan memahami etika lingkungan manusia tidak hanya mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi dapat membatasi tingkah laku dan berupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan, kata peduli adalah menaruh perhatian, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian lingkungan adalah peka dan peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan senantiasa memperbaiki bila terjadi pencemaran atau ketidakseimbangan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, www.kbbi.web.id).

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dapat ditinjau dengan dua tujuan utama, pertama dalam hal tersedianya sumber daya alam sampai sejauh mana sumber-sumber tersebut secara ekonomik menguntungkan untuk digali dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan guna membiayai kegiatan pembangunan.

Kedua, jika kekayaan yang dimiliki memang terbatas dan secara ekonomi tidak menguntungkan untuk digali dan diolah, maka untuk selanjutnya strategi apa yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan bangsa yang bersangkutan (Ramly, 2005: 28).

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup. Menurut Supardi (2009: 4) pedoman yang harus diperhatikan dalam kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain:

- a. Menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran dan kerusakan;
- b. Menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan dan lingkungan;
- c. Memanfaatkan sumberdaya alam yang *non renewable* (yang tidak dapat diganti) dengan sebaik-baiknya;
- d. Memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang.

Tanpa manusia, lingkungan hidup itu sendiri merupakan suatu sistem yang dinamis dan seringkali melahirkan berbagai perubahan, namun demikian lingkungan hidup alami diperlengkapi dengan mekanisme untuk mengembalikan pada kestabilan

dan keseimbangannya. Karena itu, manusia sebagai salah satu komponen ekosistem di alam bisa saja turut menimbulkan perubahan-perubahan, tetapi mekanisme untuk memelihara kestabilan dan keseimbangan lingkungan perlu tetap terpelihara. Jadi mau tak mau, etika lingkungan menduduki posisi yang amat fundamental dalam perikehidupan manusia di Bumi, karena tanpa kelestarian sistem pendukung kehidupan yang bahkan manusia sendiri amat bergantung padanya tidak mungkin sistem etika lainnya berkembang atau dikembangkan.

3. Pengelolaan Lingkungan

Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungan tetap lestari, harus diperhatikan tatanan/tata cara lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini manusialah yang paling tepat sebagai pengelolanya karena manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan organisme lain. Manusia mampu merombak, memperbaiki, dan mengkondisikan lingkungan seperti yang dikehendakinya, seperti menurut Daryanto (2013: 38):

- a. Manusia mampu berfikir serta meramalkan keadaan yang akan datang;
- b. Manusia memiliki ilmu dan teknologi;
- c. Manusia memiliki akal dan budi sehingga dapat memilih hal-hal yang baik.

Perubahan lingkungan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat terjadi campur tangan manusia dan dapat pula

karena faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta mengatasinya Daryanto (2013: 38-41):

1. Perubahan Lingkungan karena Campur Tangan Manusia

Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia contohnya penebangan hutan, pembangunan pemukiman, dan penerapan intensifikasi pertanian.

Penebangan hutan yang liar mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang selain itu penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadi banjir dan erosi. Akibat lain adalah muncul harimau, babi hutan, dan ular ditengah pemukiman manusia karena semakin sempitnya hewan-hewan tersebut.

Pembangunan pemukiman pada daerah-daerah yang subur merupakan salah satu tuntutan kebutuhan akan pangan, semakin padat populasi manusia lahan yang semula produktif menjadi tidak atau berkurang. Pembangunan jalan kampung dan desa dengan cara betonisasi mengakibatkan air sulit meresap ke dalam tanah sebagai akibatnya bila hujan lebat memudahkan terjadinya banjir, selain itu tumbuhan disekitarnya menjadi kekurangan air sehingga tumbuhan tidak efektif melakukan fotosintesis.

Penerapan intensifikasi pertanian dengan cara panca usaha tani, disatu sisi meningkatkan produksi sedangkan disisi lain bersifat merugikan. Misalnya pemilihan bibit unggul sehingga dalam satu kawasan lahan hanya ditanami satu macam tanaman disebut pertanian *tipe monokultur* dapat mengurangi keanekaragaman sehingga

keseimbangan ekosistem sulit untuk diperoleh, dampak yang lain akibat penerapan tipe ini adalah terjadinya ledakan hama.

2. Perubahan Lingkungan karena Faktor Alam

Bencana alam seperti kebakaran hutan di musim kemarau menyebabkan kerusakan dan matinya organisme di hutan tersebut selain itu terjadinya letusan gunung menjadikan kawasan di sekitarnya rusak. Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam agar lingkungan tetap lestari harus diperhatikan tatanan/tata cara lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini manusialah yang paling tepat sebagai pengelolanya karena manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan organisme lain.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah supaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan kelanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;

- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Partisipatif;
- k. Kearifan lokal;
- l. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. Otonomi daerah.

Selain itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya.

E. Pemberdayaan Lingkungan

1. Definisi Pemberdayaan Lingkungan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 1965:57).

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku Dakwah, Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek.

Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam

wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional (Randy R. Wrihatnolo, 2007: 75).

Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian (Abu Huraerah, 2008:87). Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Ife yang dikutip dalam bukunya Edi Suharto, mengatakan bahwa, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas (Edi Suharto, 1965:59):

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

e. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

f. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

g. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan termasuk didalamnya masalah lingkungan, seperti lingkungan tempat tinggal mereka, apakah itu di kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan konservasi, dan lain sebagainya. Yang perlu ditumbuhkan dalam pemberdayaan lingkungan adalah timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya.

Pemberdayaan ini mengarahkan manusia agar sadar dengan kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan kekuatan yang telah ada menjadi berdaya dan dapat dimanfaatkan untuk aktifitas yang berarti. Pemberdayaan pada jenis ini berkaitan

dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia itu sendiri, dimana kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh yang bersangkutan secara mandiri. Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan.

2. Tujuan Pemberdayaan Lingkungan

Tujuan pemberdayaan lingkungan adalah: (Harun M. Husein, 1992:70)

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang merupakan hakikat pembangunan nasional dan hanya dapat dicapai apabila terdapat keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungannya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain, kehematan, daya guna, hasil guna, dan daur ulang. Untuk itu dapat digunakan bermacam-macam teknologi, baik teknologi modern maupun teknologi sederhana. Sumber daya yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sumber daya yang tak dapat terbarui, aspek-aspek tersebut mutlak harus diperhatikan.

Disamping penghematan, yang tidak kalah pentingnya adalah, pencarian sumber daya alternatif guna memperoleh energi, misalnya berupa biogas, energi angin, energi surya, dan lain-lain.

- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Hal ini mengandung pengertian bahwa mengubah sifat manusia Indonesia dari perusak

lingkungan menjadi Pembina lingkungan, sehingga diharapkan mampu melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

d. Terlaksananya pembanguna berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang dimaksud pembangunan berwawasan lingkungan disini adalah upaya sadar, berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Penggunaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembanguna secara berkesinambungan hal ini mengandung pengertian pembangunan tanpa merusak lingkungan.

e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran. Tujuan ini merupakan pelaksanaan dari hak kedaulatan negara dalam rangka membela kepentingan negara dan bangsa terhadap gangguan dari luar.

F. Program Demplot Pekarangan Terpadu

1. Pengertian Demplot

Kecamatan Sukun terletak di Kota Malang, daerah ini terletak tidak jauh dari pusat kota. Pada umumnya petani di daerah ini menanam padi, umbi-umbian sebagai tanaman utama juga menanam tanaman sayur-sayuran seperti cabai dan tomat.

Permintaan masyarakat terhadap sayuran selalu meningkat, hal ini disebabkan karena sayuran sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sayuran dapat dikonsumsi dalam

segar ataupun diolah. Untuk menanggulangi masalah tentang pertanian dirasa perlu melakukan penyuluhan dan percontohan/demplot di lapangan tentang pertumbuhan tanaman sayuran.

Mengenal istilah Demplot, Demfarm dan Dem Area menurut BPP Kec. Kapas

Bojonegoro :

Demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan dilapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang 'Cara' dan/atau 'Hasil' penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani-nelayan.

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai maka demonstrasi dibedakan atas:

Demonstrasi usaha tani perorangan (Demplot), yaitu demonstrasi yang dilakukan secara perorangan (petani-nelayan/kontak tani-nelayan) dengan mengusahakan komoditi tertentu (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan), dengan areal 0,1 –0,5 hektar untuk komoditi yang memerlukannya.

Demonstrasi usaha tani-nelayan berkelompok (Dem farm) merupakan demonstrasi yang dilakukan secara kerjasama oleh petani-nelayan dalam suatu kelompok tani-nelayan, dengan areal 1-5 hektar untuk komoditi yang memerlukannya.

Demonstrasi usaha tani gabungan kelompok (Dem Area) merupakan demonstrasi yang dilakukan secara kerja sama antar kelompok tani-nelayan dalam satu wilayah (hamparan/domisili) yang tergabung dalam satu gabungan kelompok tani-nelayan, dengan areal 5-25 hektar untuk komoditi yang memerlukannya.

Melalui program *Demonstration Plot* (Demplot), lingkungan RW 09 membantu pengembangan budidaya produk pertanian di Malang khususnya di kelurahan

Bandungrejosari kecamatan Sukun RW 09. Panen raya demplot dilaksanakan di Desa RW 09 Janti Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur.

Demplot bisa berupa inovasi teknologi budidaya, VUB (Varietas Unggul Baru), pemupukan dan lain-lain, disesuaikan dengan demografi wilayah. Di wilayah Desa Janti RW 09 yang merupakan wilayah pada sektor pertanian, ada beberapa demplot yang telah dilakukan, diantaranya:

Demplot Tabela (Tanam Benih Langsung) dan Tapin (Tanam Pindah) yang dilakukan oleh kelompok tani RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan luas lahan $\pm 1,5$ hektar. Pada lahan demplot Tabela ditanam seperti sayuran, kangkung, tomat, dan lain-lain, sedangkan pada lahan demplot Tapin ditanam VUB yang memiliki beberapa keunggulan dan mempunyai produksi tinggi dengan kualitas yang baik, seperti kubis, terong, lemon, dan lain-lain.

2. Pengertian Pekarangan

Pekarangan adalah taman rumah tradisional yang bersifat pribadi, yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang erat antara manusia, tanaman, dan hewan. Pekarangan juga merupakan ruang terbuka yang sering dimanfaatkan untuk acara kekerabatan dan kegiatan sosial (Wurianingsih, 2011).

Menurut Mahendra (2009), pekarang merupakan satu kesatuan lahan yang terdiri dari berbagai macam komponen penyusun dan antar komponen saling berinteraksi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu komponen terpenting dalam pekarangan berupa rumah tinggal.

Menurut Ilmu Pertanian Agroteknologi, Pekarangan adalah sebidang atau sepetak tanah yang berada disekitar rumah baik terletak di depan, samping, bahkan belakang bangunan, tergantung seberapa luas sisa tanah yang tersisa setelah digunakan untuk membuat rumah atau bangunan utama.

Saat ini, tak jarang banyak masyarakat yang mengubah pekarangan kosong mereka menjadi pekarangan produktif seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu, tanaman hias, dan apotik hidup. Karena dengan menanam tanaman-tanaman yang produktif, mampu mengubah pekarangan menjadi lebih indah, kesehatan keluarga lebih baik, dan menambah pemasukan atau mengurangi beban biaya hidup.

Selain ditanami dengan tanaman-tanaman produktif, pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk memelihara hewan (pertenakan). Karena kotoran hewan tersebut dapat diolah menjadi pupuk anorganik, selain itu sampah yang berasal dari daun-daunan dapat dijadikan pupuk hijau.

Jika pekarangan ditanami dengan berbagai tanaman-tanaman produktif, serta pemeliharaan ternak, dan pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan banyak manfaatnya karena dapat menghasilkan bahan pangan yang sehat dengan gizi tinggi seperti sayuran-sayuran dan buah-buahan, penghasilan tambahan, menciptakan lingkungan hidup sehat, nyaman, indah, dan mampu mendukung program pemerintah (memaksimalkan pekarangan menjadi lahan produktif).

Menurut Kristanti (2012) pekarang disekitar rumah dapat memiliki berbagai fungsi sesuai peruntukannya. Adapun fungsi pekarangan secara garis besar dapat dikelompokkan:

1. Daerah umum (public area). Pekarangan dapat dilihat dan dinikmati oleh penghuni rumah juga oleh siapa saja yang lewat di depan atau disekitar rumah kita.
2. Daerah kesibukan (service area). Pekarangan ini diperuntukkan bagi penghuni rumah, misalnya tempat bermain, mencuci pakaian, mencuci piring atau lainnya. Area ini dapat ditanam tanaman bumbu-bumbuan, sayur-sayuran atau tempat menanam tanaman obat-obatan.
3. Daerah pribadi (private area). Daerah ini diperuntukkan untuk pribadi, misalnya tempat ibu atau bapak menanam tanaman hobbinya tempat “bertukang”, melakukan penelitian yang paling hemat, aman, setiap saat dapat diamati.
4. Daerah famili (family area). Daerah ini dapat dibuat taman untuk kepentingan keluarga, atau tempat berolah raga, atau tempat keluarga berkumpul, camping dan lainnya. Area ini biasanya ditempatkan di lokasi yang strategis.

Bagi masyarakat RW yang mempunyai lahan sendiri dapat ditata dengan sistem *verticulture* yaitu:

1. Memanfaatkan lahan semaksimal mungkin di mana dimensi tinggi ditata sedemikian rupa sehingga indeks panen persatuan luas dapat dilipat gandakan.
2. Menanam tanaman pada petak tanaman yang diatur seperti gundukan tanah.

3. Bertanam dalam pot-pot gantung dan tanaman yang membutuhkan rambatan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat teduh.

Tanaman yang dipilih untuk ditanami di pekarangan adalah tanaman yang banyak mengandung vitamin A, B dan C serta mengandung protein dan mineral, berumur pendek, mudah tumbuh dan mudah pemeliharannya. Untuk buah-buahan di pilih tanaman yang cepat menghasilkan dan berpotensi hasil yang tinggi, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, dapat pula dijual guna menambah pendapatan masyarakat RW 09.

Sifat fisik dari tanaman perlu diperhatikan karena tanaman tersebut ada yang tinggi dan ada yang rendah sedangkan perakarannya perlu juga diperhatikan, hal ini berguna untuk mengatur sinar matahari, kelembaban serta keindahan. Jenis tanaman yang ditanam perlu disesuaikan dengan rasa/selera kita serta kandungan gizinya.

Lahan pekarangan sebelum ditanami sebaiknya dipagar dahulu dengan tanaman yang dapat menghasilkan agar sayuran tidak dirusak oleh hewan/ternak.

Lahan pekarangan kalau ditata dengan baik dapat menjadikannya sebagai lumbung hidup, apotik hidup, atau warung hidup sekaligus sebagai tabungan masyarakat dan penambahan keindahan kampung. Di samping itu para ibu rumah tangga dapat menyediakan sendiri bahan pangannya yang beranekaragam untuk dikonsumsi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menata pekarangan adalah:

1. Pemilihan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan pekarangan, ada tanaman yang tahan naungan dan ada tanaman yang tidak tahan naungan,
2. Kandungan gizi dan vitamin yang diinginkan,

- 3. Umur tanaman,
- 4. Potensi hasil dan
- 5. Rasa/selera.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan

unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis hasil penelitian lebih terarah. Moleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu PKK RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari yang ditinjau dari unsur-unsur penting dalam pemberdayaan lingkungan adalah :
 - a. Tahap-tahap Pemberdayaan lingkungan melalui program Demplot Pekarangan Terpadu;
 - b. Aktor-aktor yang terlibat dalam program Demplot Pekarangan Terpadu
2. Indikator keberhasilan Pemberdayaan lingkungan melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu memahami makna sebagai berikut:
 - a. Peningkatan omset masyarakat RW 09;
 - b. Peningkatan kesadaran dan keinginan untuk berubah;

c. Kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam usaha; dan

d. Peningkatan solidaritas diantara kelompok RT

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena didasari karena Kota Malang dikenal sebagai kota bunga dengan berbagai tanaman yang berkembang pesat, dengan adanya taman. Pemanfaatan lahan kosong yang saat ini belum maksimal terutama di daerah perkotaan yang banyak lahan kosong malah di biarkan begitu saja oleh warga ataupun perangkat desa setempat. Sedangkan situs penelitian ini mengambil tempat pada RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari ini bisa dijadikan sebagai contoh ataupun inspirasi dalam pemanfaatan lahan kosong di daerah perkotaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Jenis data ini informasi tentang mengenai Pemberdayaan Lingkungan oleh Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan yaitu Kepala RW 09 Bapak Sugeng dan Ketua Ibu PKK RW 09 Ibu Sugeng.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan

pengalaman pribadi (Sulistyo dan Basuki 2006:173). Narasumber dalam wawancara ini adalah :

1. Ketua Kelompok Wanita Tani RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.
2. Kepala Ibu PKK RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.

2. Observasi

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Arikunto (2010:274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya. Data-data

mengenai Kepala RW 09 dan Kepala Ibu PKK maupun yang didapatkan dari Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono, 2009:305)

1. Peneliti sendiri sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2009:306).
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), Pedoman wawancara yakni panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian baik itu tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya maka peneliti harus membuat pedoman wawancara agar proses tanya-jawab berjalan dengan tersusun rapi.
3. Catatan lapangan, Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Mandolang (2007) catatan lapangan adalah tulang

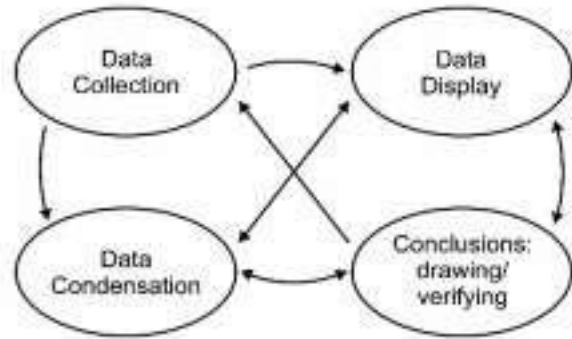
panggung riset aksi etnografis (*ethnographic action research*). Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat peneliti dalam sebuah penelitian etnografi dari lapangan. Catatan tersebut dapat bersifat deskriptif (sesuai yang teramati) atau reflektif (mengandung penafsiran peneliti).

4. Instrumen penelitian lainnya alat-alat atau media pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang penelitian. Alat-alat tersebut berupa buku, pensil, bulpoin, kamera dan alat-alat lainnya yang bisa digunakan agar penelitian berjalan dengan lancar.

G. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data reduction, data display, dan conclusion.

Gambar 3.1



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam strategi ini maka data akan dipandang tepat dalam menentukan fokus mendalam data pada proses selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola

tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

3. Data Condensation (Kondesasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

4. Conclusion Drawing/Verification (Verifikasi Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Situs dan Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Kota Malang sebagai kota pendidikan, hal ini dikarenakan Kota Malang sendiri memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren.

Kota Malang sebagai kota industri, industri di Kota Malang sangat beragam mulai dari skala kecil hingga skala besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanam modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang. Sedangkan, industri skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kota Malang sebagai kota industri. Kota Malang

sebagai kota pariwisata, potensi alam yang dimiliki kota Malang banyak mengundang para wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang berkunjung. Pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh, dan asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata, dan perbelanjaan baik yang bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja, dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan bekerja berasal dari wilayah sekitar Kota Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

1.1 Kondisi Geografis Kota Malang

a. Kondisi Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

b. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember.

Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

c. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri

2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

d. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan abu humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan Lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

1.2 Visi dan Misi Kota Malang

1.2.1 VISI : Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program

pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Istilah Martabat adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota Bermartabat, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi Bermartabat dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan

sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Masing-masing akronim dari Bermartabat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 – 2018.

Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi

siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan sara di Kota Malang.

Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka

juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

Aman, situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang.

Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan

kotayang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

1.2.2 MISI

a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan,

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah,

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja,

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.

c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan,

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender,

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

d. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota,

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.3 Peta Lokasi Kota Malang

Gambar 4.1

Gambar peta Kota Malang



Sumber : Eastjava.com Potential Map Of Malang

2. Gambaran Umum Kecamatan Sukun

2.1 Sejarah Kecamatan Sukun

Pada tahun 1767 daerah Malang diperintah oleh seorang Adipati Malojo Kusumo yang kemudian menyerah kalah kepada kompeni. Untuk memperkuat kedudukannya,

komponi mendirikan benteng pertahanan ditepi Sungai Brantas (Rumah Sakit Saiful Anwar sekarang). Disusul dengan mendirikan rumah tinggal Belanda (loge) di kanan kiri benteng yang kemudian oleh orang Malang kata loge disebut loji. Dari kata loji berubah menjadi kelojian, kemudian seiring dengan perkembangan bahasa, kata kelojian menjadi Klojen.

Pada tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Gemeente, pemerintahan yang diurus oleh Dewan Kota (Gemeenterad). Tanggal 12 Nopember 1918 Dewan Kota hasil pemilihan terbentuk. Tahun 1919 ditunjuk Burgemeester pertama yaitu H. I. Bussemaker.

Setelah tahun 1942 daerah Burgemeester dibagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing dan Kedungkandang. Kecamatan Klojen membawahi 3 Wilkmeester/lingkungan dan 8 desa (Lingkungan II, Lingkungan III, Lingkungan IV, Desa Bareng, Tanjungrejo, Purwodadi Kasri, Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo dan Penanggungan). Tahun 1967 empat desa diwilayah Kecamatan Klojen yaitu Desa Bareng, Tanjungrejo, Purwodadi dan Kasin digabung menjadi satu lingkungan yaitu Lingkungan V.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-150 tanggal 22 September 1980 dan Nomor 140-135 tanggal 14 Pebruari 1981 status desa dirubah menjadi kelurahan dan lingkungan dipecah menjadi beberapa kelurahan, yaitu :

Lingkungan II : Kelurahan Kiduldalem, Sukoharjo dan Ciptomulyo.

Lingkungan III : Kelurahan Kauman, Kasin dan Sukun.

Lingkungan IV : Kelurahan Klojen, Oro Oro Dowo, Samaan dan Rampil

Celaket.

Lingkungan V : Kelurahan Bareng, Tanjungrejo, Gading Kasri, Pisangcandi, Penanggungan, Sumbersari, Ketawanggede dan Dinoyo.

Tahun 1988 Kotamadya Daerah Tingkat II Malang wilayahnya mendapat tambahan 12 desa dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan melaksanakan pemekaran kecamatan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kedungkandang, Lowokwaru, Blimbing dan Sukun. Dari pemekaran tersebut 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen dimasukkan ke wilayah Kecamatan Sukun, yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Sukun, Tanjungrejo, Pisangcandi.

3. Kelurahan Bandungrejosari

3.1 Kondisi Geografis

Wilayah Kelurahan Bandungrejosari adalah bagian dari wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang yang merupakan pintu gerbang Kota Malang sebelah Selatan, dengan luas wilayah ± 4.452 Ha, jumlah penduduk 30.133 jiwa, Laki-Laki 15.079 orang, Perempuan : 15.054 orang, jumlah Kepala Keluarga (KK) : 8.032 KK.

Batas Wilayah Kelurahan Bandungrejosari sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Sukun
- Sebelah Timur : Kelurahan Ciptomulyo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari.
- Sebelah Barat : Kelurahan Bakalankrajan.

Secara administrasi Kelurahan Bandungrejosari terdiri dari 13 Rukun Warga (RW), dan 125 Rukun Tetangga (RT). Dengan ketinggian antara 429-667 meter diatas permukaan air laut $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,06^{\circ}$ Lintang Selatan

- Jarak ke Pemerintah Kecamatan : 1 km
- Jarak ke Pemerintah Kota : 4 km
- Jarak ke Pemerintah Propinsi : 80 km
- Jarak ke Ibukota Negara : 970 km

3.2 Visi dan Misi

a. VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima yang akuntable dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bandungrejosari

Visi Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi Kota Malang yakni “**Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat**”.

Visi Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun akan diwujudkan melalui

b. MISI Kelurahan yang meliputi :

1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas transparan dan akuntable
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

3.3 Peta Kelurahan Bandungrejosari

Gambar 4.2

Peta Kelurahan Bandungrejosari



Sumber: Profil Kelurahan Bandungrejosari

4. Gambaran Umum Demplot Pekarangan Terpadu

Ketersediaan pangan merupakan syarat keharusan dari tercapainya status ketahanan pangan di suatu negara. Untuk memperoleh ketersediaan pangan yang cukup diperlukan pemanfaatan segala sumberdaya lahan yang ada secara baik dan terencana, termasuk lahan pekarangan. Di masyarakat (terutama di pedesaan), pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan pemanfaatan pekarangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “karang” artinya tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal. Lahan yang berada di sekitar rumah jika dimanfaatkan akan memberikan kontribusi bagi kecukupan

pangan dan gizi masyarakat. Dengan kecukupan pangan tersebut maka ketahanan pangan bisa terwujud yang merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian.

Luas pekarangan ini tergantung dengan kepemilikan lahan/tanah yang tersisa dan tersedia setelah di kurangi oleh penggunaan bangunan utama. Pekarangan yang ada di pedesaan membuat rumah menjadi semakin asri dengan ditanami berbagai macam tanaman seperti singkong, pepaya, pisang, durian, mangga, rambutan, dan tanaman-tanaman obat serta bunga-bunga.

Apabila melihat pada kondisi di lapangan, banyak masyarakat telah memanfaatkan pekarangan ini hanya saja masih kurang optimal. Banyak sekali penyuluhan-penyuluhan dan program dari dinas pertanian yang terkait dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dengan sasaran utamanya adalah kelompok wanita tani. Karena memang memanfaatkan pekarangan ini tidaklah mudah karena membutuhkan konsistensi dan pendampingan secara terus-menerus. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, jika semua itu sudah terpenuhi maka tentu saja akan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan makanan seperti sayur sayuran dan bumbu-bumbu masak karena sudah menanam sendiri.

Pekarangan di Kota Malang memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian. Beberapa masyarakat di Malang, telaten mengembangkan berbagai produk pertanian yang hanya khas di pekarangan tersebut. Potensi itulah yang kemudian dianggap serius oleh Pemerintah Kota Malang. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pekarangan yang terdiri dari beberapa tanaman kecil tersebut, selain dapat membantu

meningkatkan kesejahteraan keluarga juga telah meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat disekitarnya.

Di wilayah Malang terdapat salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sukun yang di dalamnya terdapat Kelurahan Bandungrejosari. Kelurahan Bandungrejosari di salah satu desa Janti dimana terdapat objek pemberdayaan lingkungan yaitu Demplot Pekarangan Terpadu. Demplot Pekarangan Terpadu disebut sebagai pekarangan yang menghasilkan produk-produk tanaman pertanian antara lain sawi sayur dan sawi daging, cabai, tomat, jamur dan produk lainnya. Sedangkan produk perikanan antara lain ikan lele, ikan mujair, dan ternak lainnya.

Pada awal Maret 2017, masyarakat ikut serta dalam pemberdayaan lingkungan tanaman apotek hidup. Sehingga lambat hari, di tingkat Kota Malang terdapat banyak lomba tanaman apotek hidup di wilayah lain dan RW 09 ikut serta dalam lomba tersebut. Pada 15 April 2017 muncul kelompok Wanita Tani sehingga memunculkan sebuah ide untuk nama Demplot Pekarangan Terpadu yaitu Cempaka RW 09. Kelurahan Bandungrejosari mendapatkan penghargaan provinsi yang pada awal mulanya penanaman melalui polibag. Dengan adanya Demplot Pekarangan Terpadu diharapkan dapat menjadi contoh bagi RW lainnya dalam rangka pemberdayaan lingkungan melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi



Sumber: Dokumen Demplot Pekarangan Terpadu

B. Penyajian Data

1. Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu

di RW 09 Desa Janti

a. Tahap-tahap Pemberdayaan lingkungan melalui Program Demplot

Pekarangan Terpadu

Demplot Pekarangan Terpadu atau Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan program masyarakat dalam memberdayaan lingkungan yang berguna untuk masyarakat sendiri. Demplot Pekarangan Terpadu secara umum memiliki tugas utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Sehingga dengan adanya Demplot Pekarangan Terpadu ini masyarakat dapat mengelola lingkungan dengan baik dan menjaga lingkungannya. Tahap awal pemberdayaan lingkungan yang diberikan oleh Demplot Pekarangan Terpadu pada masyarakat adalah dengan memberikan lahan kosong yang tidak layak digunakan atau kumuh sehingga masyarakat dapat bergotong-royong dan bersosialisasi dengan masyarakat lain terkait dengan memanfaatkan lahan kosong, dapat melalui cara bertanam dengan baik atau cara merawat tanaman dengan baik di Demplot Pekarangan Terpadu.

Mayoritas masyarakat RW 09 yang masih tidak menjaga lingkungan dengan baik, yaitu mereka masih tidak ada penanaman tanaman di sekitar rumahnya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin maju dimana daerah pun mulai mengadopsi nilai-nilai modern, tentunya masyarakat akan semakin terbuka pemikirannya dan akan mulai beralih menuju modernitas. Dengan demikian

keberadaan Demplot Pekarangan Terpadu juga dituntut untuk berbenah sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini untuk menjaga eksistensi lingkungan. Dengan berbagai permasalahan yang muncul pada lingkungan mulai dari permasalahan yang diakibatkan masyarakat itu sendiri maupun populasi udara yang menjadikan citra lingkungan menjadi buruk, hal ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan lingkungan Demplot Pekarangan Terpadu.

Ketua Demplot Pekarangan Terpadu melalui rapat telah melakukan beberapa hal untuk pemberdayaan lingkungan, Demplot Pekarangan Terpadu merupakan pemberdayaan lingkungan di Kelurahan Bandungrejosari, yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat RW 09. Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan wawasan kepada masyarakat agar kerjasama dan saling gotong royong. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku Ketua Demplot Pekarangan Terpadu, yaitu:

“...dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk gotong royong membersihkan lahan dan membudukan tanah seperti pertanian sehingga memunculkan sebuah ide untuk membuat lahan siap di tanam” (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 10:00 di Demplot Pekarangan Terpadu Kota Malang).

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu bentuk pemberdayaan dalam hal penguatan lingkungan adalah dengan gotong royong dan membantu antar masyarakat agar mampu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Hal ini diharapkan agar anak cucu kita bisa menikmati udara segar setiap hari dan mengurangi resiko bencana.

b. Aktor-aktor yang terlibat melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu

Demplot Pekarangan Terpadu merupakan sebuah program RW 09 Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang. Upaya yang dilakukan oleh ketua RW demi mewujudkan penyelenggaraan Program Demplot Pekarangan Terpadu berbagai pihak terlibat dan berperan aktif dalam melaksanakan program tersebut. Koordinasi masyarakat untuk mewujudkan Program Demplot Pekarangan Terpadu dapat terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan untuk mendukung Program Demplot Pekarangan Terpadu tersebut. Dalam pelaksanaan Program Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 dapat melaksanakan program tersebut tanpa adanya kerjasama aktor-aktor atau *stakeholder* yang lain. Adapun aktor-aktor yang terlibat didalam pelaksanaan Program Demplot Pekarangan Terpadu adalah Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

1) Pemerintah Kota Malang

Sejatinya pemberdayaan lingkungan merupakan gerakan sinergis antar berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Namun pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam upaya pemberdayaan tersebut. Dalam pemberdayaan salah satu fungsi dan tugas pemerintah melalui Demplot Pekarangan Terpadu adalah sebagai fasilitator dan melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku seksi budidaya perikanan sebagai berikut:

“...pemerintah memberikan fasilitas dalam hal pelatihan dan pembinaan keterampilan maupun membantu masyarakat untuk mengembangkan hasil panen melalui perluasan pemasaran. Disamping itu, kami juga mengajak masyarakat

untuk memasarkan produk hasil panen dan pengenalan produk melalui acara-acara dalam lingkup lokal.”(Wawancara hari Jumat 19 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Peran pemerintah dalam bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah salah satu bentuk perhatian agar masyarakat di RW 09 dapat meningkatkan perekonomian khususnya mereka yang mempunyai keterampilan dalam pemasaran dan pertanian. Seperti yang diungkapkan Bapak Samsul selaku seksi budidaya perikanan sebagai berikut:

“...peran dan kontribusi pemerintah dalam pemberdayaan lingkungan, misalnya memberikan sosialisasi mengenai modal yang dibutuhkan, memberikan dorongan, motivasi dan semangat kepada seluruh masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu agar terus menjalankan dan mengembangkan Demplot Pekarangan Terpadu sehingga usaha mereka akan terus berjalan.” (Wawancara hari Jumat 19 Oktober 2018, pukul 16.10 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan lingkungan RW 09 tidak hanya memfasilitasi masyarakat tetapi juga sebagai tempat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

2) Masyarakat RW 09

Selain dari pihak pemerintah, masyarakat juga ikut serta dalam pemberdayaan lingkungan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Partisipasi disini merupakan bentuk dari kerjasama dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur baik individu maupun kelompok. Kurangnya partisipasi dalam tubuh masyarakat juga menjadi suatu hambatan dalam proses pembangunan.

Dalam pembangunan ini masyarakat ikut berpartisipasi dengan didasari semangat yang tinggi juga saling bergotong royong. Seperti yang terjadi di Demplot

Pekarangan Terpadu, dimana tingkat apresiasi warga dan partisipasinya pada program ini cukup tinggi. Dilihat dari kehadiran dan peranan warga yang secara aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Demplot Pekarangan Terpadu. Partisipasi dalam bentuk tenaga diwujudkan dalam bentuk pengerjaan kegiatan.

Masyarakat di RW 09 dalam pemberdayaan lingkungan di desanya tidak hanya merencanakan dan membangun tetapi mereka juga ikut bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan memelihara atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini masyarakat dapat menjaga kelestarian dan keawetan dari hasil pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan yang dilakukan dalam program Demplot Pekarangan Terpadu didasarkan atas pentingnya lahan kosong dalam pengelolaan lingkungan dan menjadikan lahan pertanian untuk kebutuhan masyarakat. Melihat kondisi dilapangan yang kumuh dan tidak terawat dengan baik namun pada awal Maret 2017 baru direalisasikan. Dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan, masyarakat setiap minggu atau bulan melaksanakan kerja bakti. Tujuannya untuk merawat dan menjaga serta menyempurnakan hasil pemberdayaan lingkungan yang tercapai dengan jangka waktu yang lama dan kelak dapat dinikmati juga oleh anak cucu kita.

Untuk meningkatkan kebersamaan dalam meraih keberhasilan masyarakat RW 09 melakukan pemasaran produk dari hasil panen. Dana hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembelian bibit baru, memperbaiki tanaman dan lokasi tanaman, dan lain-lain. Dana pemasaran tersebut pada hakikatnya merupakan dana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sendiri. Dana tersebut bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat Demplot Pekarangan

Terpadu. Seperti cuplikan wawancara dengan Bapak Samsul Riadi, yaitu:

“...iuran biasanya Rp. 10.000,- per orang. Itu nanti buat uang kas, uang jaga-jaga.

Kayak misalnya butuh uang untuk memberi bibit, pupuk.” (Wawancara hari Jumat 19 Oktober 2018, pukul 16.45 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Dana pemasaran dapat membantu masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan. Disisi lain dana tersebut melahirkan kesadaran

kolektif akan pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan. Seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Fadol, sebagai berikut:

“...lumayan, bisa buat nambah-nambah biaya kalau mau ada tamu yang berkunjung ke kebun, jadi ada konsumsinya trus di tambah ada produk olahan dari kebun seperti keripik bayam, dan lain-lain.” (Wawancara hari Sabtu 20 Oktober 2018, pukul 17.00 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Dari keterangan di atas, aktor dalam pemberdayaan di Demplot Pekarangan

Terpadu ini adalah masyarakat RW 09 Janti. Peran masyarakat disini adalah pelaku

pengelola tanaman yang dikepalai oleh Ketua RW. Pengelolaan lingkungan Demplot

Pekarangan Terpadu ini sangat meningkatkan ekonomi dari masyarakat RW 09 Janti,

khususnya dalam menambah pangan yang ada disana.

2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program

Demplot Pekarangan Terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari

Kecamatan Sukun

Keberhasilan adalah suatu keadaan dimana suatu program mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pemberdayaan adalah terwujudnya

masyarakat yang berdaya baik secara personal, sosial, maupun ekonomi. Dalam

kaitan ini, usaha untuk memberdayakan lingkungan Demplot Pekarangan Terpadu

dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Hal itu dilakukan dengan cara memberi fasilitas pelatihan dan keterampilan terkait dengan usaha tani.

Pelatihan dan pembekalan keterampilan bagi masyarakat RW 09 dapat meningkatkan kapasitas manusia dan kemandirian masyarakat serta kesejahteraan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsul dalam wawancara, sebagai berikut:

“...harapannya setelah adanya pelatihan dan pemberian sarana dalam pemberdayaan ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Jika masyarakatnya sudah mandiri, maka mereka akan bisa meningkatkan kualitas perekonomian masing-masing tanpa harus ada ketergantungan terhadap pemerintah lagi.”(Wawancara hari Jumat 19 Oktober 2018, pukul 17.00 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Hal tersebut sangatlah penting karena kemandirian didasarkan pada sejauh mana keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat RW 09. Dari sisi kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat RW 09 yang telah dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan yang telah memberikan manfaat dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Indikator keberhasilan melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu, sebagai berikut:

1) Peningkatan Omset masyarakat RW 09

Adanya peningkatan omset usaha dan peningkatan penghasilan masyarakat merupakan poin penting dalam pemberdayaan. Seperti yang dikutip dalam wawancara bersama dengan Bapak Samsul, sebagai berikut:

“...kalau keberdayaan secara ekonomi itu yang paling menonjol dapat dilihat dari omzet dan jumlah pendapatannya pemasaran tanaman perhari atau perbulannya. Selain itu juga bisa dilihat dari peningkatan kualitas tanaman yang baik karena masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu sudah mendapat pelatihan-pelatihan dari Pemerintah.”(Wawancara hari Jumat 19 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, peningkatan omset masyarakat merupakan indikator yang paling mencolok dalam menentukan keberdayaan ekonomi dalam sebuah kelompok masyarakat. Omset di RW 09 Janti telah meningkat setelah adanya pemberdayaan dibanding sebelumnya.

2) Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah

Adanya dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Malang telah melahirkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu dilakukan melalui aktivitas yang telah di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Malang baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan sarana.

Hal tersebut dapat dilihat adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Misalnya seperti pelatihan penanaman, meskipun pelatihan dilakukan dan diperuntukkan bagi masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu, namun karena kebutuhan keterampilan dan pengembangan kemampuan petanian masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu, maka masyarakat RW 09 pun mau mengikuti kegiatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Lia selaku masyarakat sebagai berikut:

“...pelatihan dalam pertanian sebenarnya diberikan untuk Demplot Pekarangan Terpadu, akan tetapi karena masyarakat perlu juga ya buat nanam di depan rumah kan ada lahan kosong meskipun cuma sedikit. Alhamdulillah masyarakat juga diizinkan untuk ikut. Saya senang ikut kegiatan ini meskipun gak pandai-pandai banget dalam penanaman.”(Wawancara hari Sabtu 20 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB di RT 07 RW 09).

Lebih lanjut, Sundari mengemukakan bahwa:

“ya kan lingkungan merupakan bagian penting, maka masyarakat RW 09 diikutsertakan dalam pelatihan ini dengan harapan adanya peningkatan kemampuan dalam hal penanaman. Alhamdulillah setelah mengikuti ini, kemampuan masyarakat tentunya ibu-ibu rumah tangga kayak saya meningkat.”(Wawancara hari Sabtu 20 Oktober 2018, pukul 08.30 WIB di RT 06 RW 09 Janti).

Sehingga dapat disimpulkan, setelah diadakannya pelatihan dalam mengelola lingkungan atau khususnya dalam tanaman bagi masyarakat RW 09 Janti, kemampuan masyarakat RW 09 pun telah meningkat dan hasilnya telah dirasakan oleh masyarakat RW 09 Janti itu sendiri.

3) Kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam usaha

Permasalahan dan hambatan dalam berusaha pasti dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk juga bagi pertanian di lingkungan RW 09. Namun demikian para pendamping Demplot Pekarangan Terpadu telah menanamkan kesadaran kolektif masyarakat termasuk dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam menanam.

Hal ini dibuktikan dalam adanya rapat-rapat rutin yang dilakukan oleh masyarakat RW 09. Rapat tersebut dilakukan untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang muncul dan mencari solusi pemecahan yang tepat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Samsul sebagai berikut:

“...kita selalu diajak untuk mengadakan rapat. Dalam hal ini kita diminta untuk mengemukakan masalah yang dihadapi dalam proses penanaman mulai pembibitan sampai panen. Lalu dibahas penyelesaiannya, jadi enak sesama RT bisa saling tolong menolong dalam menjalankan Demplot Pekarangan Terpadu ini.”(Wawancara hari Jumat 19 Oktober 2018, pukul 16.30 WIB di Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti).

Rapat rutin bulanan RW 09 sangat penting karena dibutuhkan dalam mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat RW 09 dan bagaimana pemecahannya. Selain itu, dalam rapat bulanan juga dapat membutuhkan solidaritas dalam kelompok untuk lebih mensukseskan pemberdayaan di Demplot Pekarangan Terpadu.

4) Meningkatkan solidaritas diantara kelompok RT

Rapat-rapat rutin yang diselenggarakan dapat menghasilkan semangat masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan secara bersama-sama. Mereka bahu membahu dalam membahas dan mencari jalan keluar hambatan yang dihadapi.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat rapat berlangsung. Suasana Nampak akrab dan permasalahan dan hambatan anggota kelompok selalu dicarikan jalan keluarnya.

Dengan demikian apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing individu kelompok RT hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memecahkan masalah bersama secara kolektif. Melalui rapat-rapat yang diselenggarakan di atas.

C. Pembahasan

1. Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu

di RW 09 Desa Janti

a. Tahap-tahap Pemberdayaan lingkungan melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu

Kebutuhan sandang, pangan, dan papan merupakan salah satu faktor terbesar masyarakat dalam beraktifitas kesehariannya, tak dipungkiri dengan adanya keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan maka munculah keinginan masyarakat untuk terus meningkatkan pembangunan. Salah satunya ialah pembangun perumahan, mall, dan lain-lain tanpa melihat kebutuhan lingkungan yang kurang untuk menyerap polusi lingkungan, namun dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut lebih menjadi primadona di kalangan masyarakat karena berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki.

Namun keberadaan Demplot Pekarangan Terpadu tidak boleh hanya dipandang sebelah mata saja, karena Demplot Pekarangan Terpadu merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat, dikarenakan jumlah masyarakat yang ada pada Demplot Pekarangan Terpadu dimana hal ini berhubungan langsung dengan mereka yang bekerja sebagai penjual, peternak, dan sebagainya. Tentunya muara dari barang yang mereka produksi ialah dapat dijual kembali. Selain itu, Demplot Pekarangan Terpadu juga memiliki berbagai macam potensi sosial dan pendapatan desa. Potensi sosial, dengan adanya interaksi antara RT 01 sampai dengan RT 09 yang jarang di temukan ketika dalam bermasyarakat, tentunya ini menjadi nilai tambah Demplot Pekarangan Terpadu sekaligus hal ini mampu mewujudkan sosial masyarakat yang

baik. Potensi pendapatan desa, pendapatan desa beberapa diantaranya ialah diperoleh melalui penjualan hasil tanaman, tentunya dengan semakin luasnya pasar penjualan dan bertambahnya hasil panen yang ada pada Demplot Pekarangan Terpadu akan menambah jumlah pendapatan desa melalui penjualan tersebut.

Akan tetapi, dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, dan semakin meluasnya kebutuhan masyarakat yang buruk buruk dikalangan masyarakat terutama para pemuda yang dengan gengsinya lebih memilih untuk pembangunan daripada memelihara dan menjaga lingkungan dengan baik. Citra Demplot Pekarangan Terpadu yang buruk ini perlu untuk dievaluasi oleh Ketua dan masyarakat yang lain, untuk itu salah satu hal yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan pemberdayaan lingkungan kepada masyarakat, karena salah satu faktor utama untuk meningkatkan citra Demplot Pekarangan Terpadu ialah pada sisi masyarakat tersebut.

Dalam buku milik Mardikanto (2015: 26) yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat*. Menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya. Hal ini membuat RW 09 dengan melakukan pemberdayaan lingkungan melalui Demplot Pekarangan Terpadu sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat, membantu masyarakat meningkatkan pendapatan ekonomi.

Pada sebuah tahap pemberdayaan lingkungan pasti tidak terlepas dari yang disebut strategi pemberdayaan. Setiap pelaksanaan pemberdayaan lingkungan perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu pengertian strategi sering rancu dengan metode, teknik atau taktik. Demplot Pekarangan Terpadu terbangun dengan sangat terencana dan terstrategis.

b. Aktor-aktor yang terlibat melalui program Demplot Pekarangan Terpadu

Salah satu misi RW 09 yaitu untuk membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan lingkungan, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.

Pemberdayaan lingkungan merupakan Program Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menjadi salah satu kebijakan yang mengarah pada pembangunan di Kota Malang.

Pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari salah satunya yaitu Kelompok Wanita Tani Cempaka RW 09, mengingat lingkungan merupakan salah satu aspek yang harus dijaga dan di lindungi.

Dalam pelaksanaannya, Pemberdayaan lingkungan Demplot Pekarangan Terpadu dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak saja, yaitu pihak Pemerintah dan pihak masyarakat.

Hal ini seharusnya mengakibatkan ketidak sinergian hubungan antara aktor-aktor pemberdayaan. Namun, yang terjadi di RW 09 Janti adalah pemberdayaan tetap

berjalan walaupun tanpa kehadiran pihak swasta. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan dalam pemberdayaan lingkungan Demplot Pekarangan Terpadu dan adanya peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat RW 09 Janti.

Dalam rangka pemberdayaan lingkungan perlu adanya aktor yang mendukung dan berperan agar pemberdayaan lingkungan yang diinginkan dapat tercapai. Peran masyarakat yang paling menonjol adalah peran pengambilan keputusan dan kerjasama. Hal ini terbukti dengan adanya yang ditunjuk oleh Ketua RW untuk membantu proses pemberdayaan lingkungan yaitu setiap RT memberikan pengarahan kepada masyarakatnya.

Berbicara mengenai aktor, tentu tidak lepas dari peran masing-masing aktor tersebut. Mardikanto dan Soebianto (2013: 142-143) menyebutkan bahwa terdapat beberapa peran aktor pemberdayaan, yakni meliputi:

- a) Peran edukasi: berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar bersama penerima manfaat, dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat.
- b) Peran diseminasi inovasi: peran penyebarluasan informasi inovasi di "luar" kepada masyarakat penerima manfaat, dan dari sesama warga masyarakat kepada masyarakat lain.
- c) Peran fasilitas: memberikan kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang lain. Pengertian fasilitas termasuk di dalamnya adalah peran mediasi atau sebagai peran antar pemangku kepentingan pembangunan.
- d) Peran konsultasi: sebagai penasihat atau memberi alternative pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat dan pemangku yang lain.

e) Peran advokasi: memberikan peran bantuan kaitannya dengan rumusan atau pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaatnya (umumnya bagi kelompok kelas bawah).

f) Peran supervisi: peran sebagai penyedia (*supervisor*) pelaksana kegiatan advikasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaatnya.

g) Peran pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi: peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan masih sedang dilaksanakan, maupun pada saat sebelumnya dan setelah kegiatan dilaksanakan.

Pada data wawancara yang dihimpun sebelumnya, dapat diketahui bahwa aktor-aktor yang melaksanakan perannya dengan baik. Hal tersebut membutuhkan strategi pemberdayaan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Prasojo dalam Suryono dan Nugroho (2008) menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi untuk memberdayakan masyarakat, yaitu:

a) Memberdayakan masyarakat dengan “menyosialisasikan” peran masyarakat sebagai subjek.

b) Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif, dan efisien.

c) Mobilisasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesionalitas yang dimilikinya.

d) Memaksimalkan peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mengatur agar penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar.

Penjelasan mengenai teori aktor-aktor pemberdayaan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut tercermin dari aktor-aktor pemberdayaan baik formal maupun nonformal dalam pemberdayaan lingkungan melalui program Demplot Pekarangan Terpadu melakukan peranan sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2013) tersebut. Agen pemberdaya melakukan peran edukasi sampai dengan pemantauan terus menurut terhadap perkembangan masyarakat hingga sekarang. Aktor-aktor baik formal maupun non formal yang menjalankan pemberdayaan lingkungan melalui program Demplot Pekarangan Terpadu di desa RW 09 Janti telah melakukan peranannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk berperan serta menyukseskan program Demplot Pekarangan Terpadu. Selain itu, kesuksesan aktor pemberdayaan lingkungan tercermin dari keberhasilan aktor dalam menyampaikan pelatihan dan promosi hasil tanaman bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar dan lebih bersih dan higienis di kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, upaya pelaksanaan peran oleh aktor-aktor pemberdayaan lingkungan melalui program Demplot Pekarangan Terpadu di desa RW 09 Janti terbilang maksimal dan berdaya guna.

2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun

Indikator keberhasilan perekonomian masyarakat merupakan sesuatu yang menjadi petunjuk dalam menentukan perekonomian masyarakat telah berdaya atau

belum. Dalam hal ini, Gunawan (1999: 138) dalam Mujab (2005: 21) mengungkapkan beberapa Indikator Keberhasilan Program untuk mengukur pelaksanaan Program adalah:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok lain dalam masyarakat
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapat yang ditandai oleh peningkatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Keberdayaan ekonomi masyarakat Demplot Pekarangan Terpadu RW 09 merupakan tujuan akhir dari adanya kegiatan pemberdayaan lingkungan. Edi Soeharto (2005) menyatakan ada 4 (empat) keberhasilan pemberdayaan, yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*);
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*);
- c. Tingkat kemampuan untuk menghadapi hambatan (*power over*);
- d. Tingkat kemampuan untuk kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Derajat keberdayaan yang telah dijelaskan oleh Edi Soeharto diatas, kemudian disesuaikan dengan keberdayaan lingkungan Demplot Pekarangan Terpadu, yaitu:

- a. Peningkatan omset masyarakat RW 09;
- b. Peningkatan kesadaran dan keinginan untuk berubah;
- c. Kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam usaha;
- d. Peningkatan solidaritas diantara kelompok RT.

Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah pada masyarakat Demplo Pekarangan Terpadu RW 09 dilihat pada besarnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan dalam masyarakat RW 09 dapat dilihat dari adanya rapat-rapat rutin kampung yang dilakukan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat RW 09 dan mencari solusi dalam pemecahan masalahnya. Yang terakhir adalah tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas antara kelompok RT, hal ini dibuktikan dari adanya solidaritas yang kuat antara masyarakat RW 09.

Pemberdayaan lingkungan sangat penting dalam era globalisasi seperti sekarang ini dimana kemandirian berusaha dan keterampilan merupakan unsur kunci dalam persaingan di era globalisasi. Hal tersebut telah dirasakan oleh para pengambil kebijakan dan juga *stakeholder* industry kecil dan menengah di lingkungan RW 09 Janti Kelurahan Bandungrejosari. Sehingga segala bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun *stakeholder* Demplo Pekarangan Terpadu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Dengan bekal kemandirian, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan modal sosial dari masyarakat sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sikap kemandirian, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang mandiri, berpengetahuan dan berketerampilan mempunyai peluang yang sangat besar dalam kaitan dengan meningkatnya perekonomian. Semakin mandiri, semakin berpengetahuan dan semakin berketerampilan maka semakin tinggi peluang masyarakat untuk maju dan meningkat perekonomiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberdayaan perekonomian masyarakat sangat bergantung juga dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Dalam era globalisasi, persaingan usaha akan sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang tinggi agar dapat diserap oleh pasar. Hal tersebut disadari oleh pengambilan kebijakan di lingkungan RW 09 sehingga upaya peningkatan daya serap dikaitkan dengan peningkatan kualitas SDM.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pemberdayaan lingkungan melalui program Demplot Pekarangan Terpadu di RW 09 Janti Kota Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lingkungan melalui program demplot pekarangan terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun. Yang diteliti seperti :
 - a. Tahap-tahap Pemberdayaan lingkungan melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu adalah :
 - a. Tahap awal pemberdayaan lingkungan yang diberikan oleh Demplot Pekarangan Terpadu pada masyarakat adalah dengan memberikan lahan kosong yang tidak layak digunakan atau kumuh sehingga masyarakat dapat bergotong-royong membersihkan dan merawat lahan tersebut dengan baik serta bersosialisasi dengan masyarakat lain terkait dengan memanfaatkan lahan kosong, dapat melalui cara bertanam dengan baik atau cara merawat tanaman dengan baik di Demplot Pekarangan Terpadu.
 - b. Tahap kedua adalah Ketua Demplot Pekarangan Terpadu melalui rapat telah melakukan beberapa hal untuk pemberdayaan lingkungan, Demplot Pekarangan Terpadu merupakan pemberdayaan lingkungan di Kelurahan Bandungrejosari, yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat RW

09. Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan wawasan kepada masyarakat agar kerjasama dan saling gotong royong.
- b. Aktor-aktor yang terlibat melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu adalah :
- Pemerintah Kota Malang mempunyai peran penting dalam program ini yaitu fungsi dan tugas pemerintah melalui Demplot Pekarangan Terpadu adalah sebagai fasilitator dan melakukan pembinaan kepada masyarakat, tidak hanya memfasilitasi masyarakat tetapi juga sebagai tempat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
 - Masyarakat RW 09 berpartisipasi dalam bentuk dari kerjasama dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur baik individu maupun kelompok serta dalam pengelolaan lingkungan Demplot Pekarangan Terpadu ini sangat meningkatkan ekonomi dari masyarakat RW 09 Janti, khususnya dalam menambah pangan yang ada disana.
2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Lingkungan Melalui Program Demplot Pekarangan Terpadu di Desa Janti Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun, dapat di lihat dari :
- Keberhasilan pemberdayaan lingkungan melalui Demplot Pekarangan Terpadu ditunjukkan dengan: a) Kegiatan produksi masyarakat mengalami peningkatan hasil tanam yang dijual ketika ada wisatawan dan tamu dari jauh yang berkunjung. Masyarakat juga telah mampu menjangkau faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan skill, b) kegiatan distribusi masyarakat terlaksana dengan baik dan mengalami kemajuan, karena dapat memasarkan produknya tidak hanya dari *door to door* tetapi sudah ada yang membuka online dan melalui kegiatan pameran, c) konsumsi, kegiatan konsumsi masyarakat juga mengalami peningkatan, dengan setidaknya dapat

terus memenuhi kebutuhan primer yaitu kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli barang-barang kebutuhan sekunder, walaupun belum semua masyarakat mampu mencapai mengkonsumsi barang tersier.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diajukan beberapa saran sebagai pertimbangan dalam keberadaan kelompok tani pada program Demplot Pekarangan Terpadu, yaitu:

1. Pemberdayaan dalam lingkungan melalui program Demplot Pekarangan Terpadu sudah baik

namun program ini harus lebih dikembangkan lagi khususnya bagi masyarakat RW 09

Janti Kota Malang harus berusaha keras untuk mempertahankan pemberdayaan lingkungan

supaya RW 09 Janti terlihat lebih indah dan bersih.

2. Bagi pemerintah harus sering mengadakan pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat RW 09

Janti Kota Malang, dengan diadakan pelatihan maka masyarakat antusias dan ikut serta

dalam kegiatan di RW 09.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Nursaidah, 2018. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan". Melalui <http://www.academia.edu/28724420/> [13/03/18]
- Akaibara, 2016. "Profil Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang". Melalui <https://ngalam.co/2016/06/11/profil-kelurahan-sukun-kecamatan-sukun-kota-malang/> [18/10/18].
- Budiarti, Desy. 2017. "Pemberdayaan Batik Tulis Sendang oleh Pemerintah Daerah sebagai Produk Unggulan (Studi di Desa Sendang agung dan Desa Sendang duwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- ExsyFathoni, Tiara Putri. 2016. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hakim, EM Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Irwan, DjamalZoer'aini, 1996. *Prinsip-Prinsip Ekologi (Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ishaq, Hasan, 2017. "Sejarah Malang denganSebutan Malang Kota Bunga (Makobu)". Melalui <https://ngalam.co/2017/05/30/> [19/02/18].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khairunnisa, Anna. 2015. "Pemberdayaan Kampung Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Kampung Jahit Pucangan dan Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Surabaya)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Muhammad, Mirza. 2017. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Industri Sandal dan Sepatu Desa Wedoro Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Oxford English Dictionary. 2006. *Little Oxford English Dictionary*. California: Oxford University Press
- Putri, Irmaya Rafika. 2016. "Implementasi Program Shodaqoh Oksigen sebagai Perwaju dan Tanggung Jawab di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Shodaqoh Oksigen)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Kota Malang. melalui <https://malangkota.go.id/> [27/09/2018].
- Peta Kota Malang. melalui <http://www.eastjava.com>. [23/10/2018]

- Riza, Risyanti dan Roesmidi, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint
- Jatinangor. Siagian, Sondang Paian, 1993. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sugandhy, Acadan Rustam Hakim, 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suprihatin Agung, Daryanto, 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soeriaatmadja, R.E, 1999/2000. *Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Trisnawati, Tri Adinda. 2016. "Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai Wujud Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (RRPL)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Zaini, WS Afrizal, 2011. "Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat". Melalui [https://afrizalwszaini.wordpress.com/2011/02/20/\[25/06/18\].](https://afrizalwszaini.wordpress.com/2011/02/20/[25/06/18].)